KOTA BLITAR

PPAS
2023

PEMERINTAH KOTA BLITAR
2022

BPKAD Kota Blitar

KOTA BLITAR

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 16 TAHUN 2022

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 16 TAHUN 2022

NOMOR : 8 TAHUN 2022
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd.**
   Jabatan : Wali Kota Blitar
   Alamat Kantor : Jl. Merdeka No. 105 Blitar

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Blitar

2. Nama : **dr. SYAHRUL ALIM**
   Jabatan : Ketua DPRD Kota Blitar
   Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 19 Blitar

   Nama : **ELY IDAYAH VITNAWATI**
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
   Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 19 Blitar

   Nama : **AGUS ZUNAIDI, S.E.**
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
   Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 19 Blitar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Organisasi Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Blitar, 2 Agustus 2022

WALIKOTA BLITAR

Drs. SANTOSO, M.Pd.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

dr. SYAHRUL ALIM
KETUA

ELY IDAYAH VITNAWATI
WAKIL KETUA

AGUS ZUNAIDI, S.E.
WAKIL KETUA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR
NOMOR : 188/13/410.040/DPRD/2022

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2023
DAN
PERSETUJUAN ATAS PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

Menimbang : bahwa dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas KUA dan PPAS tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

10. Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar.

Memperhatikan : 1. Penyampaian Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar pada tanggal 2 Agustus 2022;

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Blitar yang telah disampaikan dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada tanggal 2 Agustus 2022;

3. Hasil Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada tanggal 2 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : a. Menyetujui Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;

b. Menyetujui Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : a. Naskah Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Naskah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Blitar serta Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi menjadi lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Menyerahkan Keputusan ini kepada Wali Kota Blitar untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 2 Agustus 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

KETUA,

dr. SYAHRUL ALIM

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	**I-1**
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Tujuan Penyusunan PPAS	I-2
1.3	Dasar Penyusunan PPAS	I-2
BAB II	**RENCANA PENERIMAAN DAERAH**	**II-1**
BAB III	**PRIORITAS BELANJA DAERAH**	**III-1**
3.1	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional	III-1
3.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	III-63
3.3	Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah	III-134
BAB IV	**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**	**IV-1**
4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	IV-1
4.2	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja	IV-119
BAB V	**RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**	**V-1**
BAB VI	**PENUTUP**	**VI-1**
Lampiran	**Daftar calon penerima hibah dan bantuan sosial tahun 2022**	

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rencana pembangunan tahunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan BAB III Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

PPAS merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. PPAS disusun dengan tahapan a). menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b). menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi; c). menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota dan d). menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

PPAS pada dasarnya mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai, termasuk program prioritas dari SKPD. Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Kota Blitar mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang telah tertuang dalam RKPD Tahun 2023, telaah kebijakan nasional dan provinsi serta kinerja pembangunan tahun sebelumnya.

Dalam PPAS Tahun 2023, Prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pelayanan dasar, visi, misi,

dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Pembahasan KUA dan PPAS Kota Blitar yang telah disepakati dituangkan masing-masing dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani Kepala Daerah dan DPRD dalam waktu bersamaan. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kota Blitar untuk menyusun, menyampaikan dan membahas serta melaksanakan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan dari penyusunan PPAS Kota Blitar Tahun 2023 yaitu:

1. Menyesuaikan asumsi dalam KUA, baik yang menyangkut proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan;
2. Menyajikan batas maksimal anggaran atau plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Meningkatkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
4. Meningkatkan konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengawasan pembangunan dan
5. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Penyusunan PPAS

Penyusunan PPAS Kota Blitar Tahun 2023 didasarkan pada peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik IndonesiaTahun

1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 TAHUN 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia ahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun. 2014, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020, Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Tahun. 2014, Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5610) sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6797);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 6057);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
28. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019

Nomor 225);

31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 462);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barng MIlik Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1076);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
50. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
51. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
52. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 62);
53. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 66);
54. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan

Sosial (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 67);

55. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 68);
56. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 60).

BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluran daerah.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah yang terdiri atas a). Pendapatan Daerah dan b). Penerimaan Pembiayaan Daerah. Penerimaan daerah sendiri yang merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan daerah. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun rencana penerimaan daerah Kota Blitar Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

A. Rencana Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pada tahun 2023 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp.912.016.541.093,00 yang bersumber dari 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.177.884.476.980,00 2). Pendapatan Transfer sebesar Rp. 725.892.888.113,00 dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp. 8.239.176.000,00.

B. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Rencana penerimaan pembiayaan daerah Kota Blitar Tahun

2023 diperkirakan sebesar Rp. 84.383.493.780,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Perkiraan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	**PENDAPATAN DAERAH**		
04.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**177.884.476.980**	
04.01.01	Pajak Daerah	44.650.054.610	UU No. 1 Tahun 2022
04.01.02	Retribusi Daerah	10.187.488.251	UU No. 1 Tahun 2022
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.169.069.219	
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	121.877.864.900	
04.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**725.892.888.113**	
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	630.349.612.113	PP 12 Tahun 2019 Permendagri No. 77 Tahun 2020
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.543.276.000	
04.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.239.176.000**	
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.239.176.000	Permendagri No. 28 Tahun 2021
	JUMLAH PENDAPATAN	**912.016.541.093**	
6	**PEMBIAYAAN**		
06.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**84.383.493.780**	
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84.383.493.780	PP 12 Tahun 2019 Permendagri No. 77 Tahun 2020
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**84.383.493.780**	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	**996.400.034.873**	

Adapun perkiraan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2023 secara rinci per obyek pendapatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Rencana Penerimaan Daerah Per Obyek Pendapatan
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**177.884.476.980**
4.1.1	**Pajak Daerah**	**44.650.054.610**
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.167.717.025
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.544.325.348
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.051.662.237
4.1.01.09	Pajak Reklame	614.500.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	10.311.500.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	336.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	63.350.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	12.061.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.500.000.000
4.1.2	**Retribusi Daerah**	**10.187.488.251**
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.806.147.451
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.537.455.700
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	843.885.100
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.169.069.219
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.169.069.219
4.1.4	**Lain-lain PAD yang Sah**	**121.877.864.900**
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	48.387.700
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.698.274.109
4.1.04.05	Jasa Giro	3.475.131.030
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.630.731.400
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	115.000.000.000
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	25.340.661
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**725.892.888.113**
4.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**630.349.612.113**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**594.039.734.113**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	109.284.000.113
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	393.968.854.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	19.738.150.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	71.048.730.000
4.2.01.02	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**36.309.878.000**
4.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**95.543.276.000**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	93.669.717.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1.873.559.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.239.176.000**
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.239.176.000

Kode	Uraian	Jumlah
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.239.176.000
	Jumlah Pendapatan Daerah	**912.016.541.093**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**84.383.493.780**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84.383.493.780
	Jumlah Penerimaan Daerah	**84.383.493.780**
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	**996.400.034.873**

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Tema pembangunan nasional tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah: "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**"**.** Untuk menterjemahkan tema besar tersebut, Pemerintah telah menetapkan 7 (tujuh) prioritas nasional, yakni:

1. Prioritas Nasional 1:

   Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
   b. akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Prioritas Nasional 2:

   Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

   a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
   c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
   d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
   e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Prioritas Nasional 3:

   Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. pengentasan kemiskinan; dan
g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Prioritas Nasional 4:

   Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

   a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
   b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
   c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Prioritas Nasional 5:

   Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

   a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
   b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
   c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
   d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
   e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Prioritas Nasional 6:

   Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

   a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
   b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
   c. pembangunan rendah karbon.

7. Prioritas Nasional 7:

   Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

   a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
   c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
   e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Prioritas nasional yang mendapat penekanan pada tahun 2023 adalah prioritas 1,2,3 dan 5 dengan *major project*:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
   a. food estate (kawasan sentra produksi pangan)
   b. destinasi pariwisata prioritas
   c. pengelolaan terpadu UMKM
   d. akselerasi pengembangan energi terbaharukan dan konservasi energi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
   a. wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay
   b. pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
   a. reformasi sistem perlindungan sosial
   b. reformasi kesehatan nasional
   c. reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0
4. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
   a. kawasan industri prioritas dan smelter
   b. jaringan pelabuhan utama terpadu

Sinergi program perangkat daerah Kota Blitar yang mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2023 disajikan pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Angka ketersediaan energi perkapita/hari		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Angka ketersediaan energi perkapita/ hari		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Angka konsumsi energi per kapita		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase balita rawan pangan yang tertangani		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Tingkat keamanan pangan segar (%)		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
			Indeks Kepuasan Masyarakat0		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi0		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Persentase Koperasi yang mengalami peningkatan volume usaha		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
			Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase WUB yang berhasil dikembangkan		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase penerbitan izin sesuai SOP		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			"Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Volume penjualan hasil olahan perikanan (juta rupiah)		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana obyek pariwisata		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Persentase Peningkatan Usaha Pariwisata		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pendidikan	
			Indeks Kepuasan Masayarakat		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan	
			indeks kepuasan masyarakat		
				Dinas Pendidikan	
			Indeks Kepuasan masyarakat		
				Dinas Pendidikan	
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Pendidikan	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pendidikan	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertuntaskan sesuai hasil assesment		
				Dinas Pendidikan	
			Persentase angka kelulusan SD/MI		
				Dinas Pendidikan	
			persentase angka kelulusan SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan	
			Persentase angka kelulusan SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan	
			Persentase Angka kelulusan SMP/MTs		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan	
			Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan	
			Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)		
				Dinas Pendidikan	
			persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)		
				Dinas Pendidikan	
			Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)		
				Dinas Pendidikan	
			Persentasesatuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)		
				Dinas Pendidikan	
			Persentase Satuan Pendidikan Dasar Berakreditasi minimal B (SMP/MTs)		
				Dinas Pendidikan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B		
				Dinas Pendidikan	
			Persentase Satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti Korupsi		
				Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Kesehatan	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan		
				Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM) "		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM) "		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
			Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Sosial	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Peningkatan PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
			Persentase pencari kerja yang ditempatkan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase komposisi perempuan di sektor bisnis		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase PD yang melaksanakan PPRG		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase perempuan pengambil keputusan publik		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Rata-rata usia kawin pertama wanita		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase anggota Kelompok Tribina & UPPKS yang ber-KB		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Persentase Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Cakupan Fasilitas Olahraga sesuai standart		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Cakupan Pelatih yang tersertifikasi		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Cakupan Pembinaan Atlit Muda		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang di kelola		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Sukorejo	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			Persentase RT berdaya		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			Presentase RT Berdaya		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	
			2. Persentase RT Berdaya		
				Kecamatan Sukorejo	
			Persentase hasil koordinasi bidang pembendayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang di tindak lanjut		
				Kecamatan Sukorejo	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	
			Persentase RT Berdaya		
				Kecamatan Sukorejo	
			Preesentase RT Berdaya		
				Kecamatan Sukorejo	
			Presentase RT Berdaya		
				Kecamatan Sukorejo	
			Presentasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sananwetan	
			Persentase rt berdaya		
				Kecamatan Sananwetan	
			Persentase RT berdaya		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Sananwetan	
			Persentase RT Berdaya		
				Kecamatan Sananwetan	
			Presentasi hasil koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan yang ditindak lanjuti		
				Kecamatan Sananwetan	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase budaya lokal yang dikembangkan		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Persentase kesejarahan yang dikembangkan		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase Kampung Berkarakter Pancasila		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Persentase penyelesaian konflik keagamaan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase gedung pemerintahan yang dibangun		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase jalan dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase jembatan dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase Pekerjaan Konstruksi yang Sesuai Standar		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase ketersediaan dokumen tata ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM)		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Persentase tingkat hunian Rusunawa		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
			Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			IKM layanan angkutan sekolah gratis		
				Dinas Perhubungan	
			IKM terhadap layanan parkir tepi jalan umum		
				Dinas Perhubungan	
			IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor		
				Dinas Perhubungan	
			IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum		
				Dinas Perhubungan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik		
				Dinas Perhubungan	
			Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas		
				Dinas Perhubungan	
			Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar)		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase pengawasan peredaran obat hewan		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase sarana pertanian yang tersedia		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase produk RPH yang dijamin ASUH		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Dokumen IKM yang tersusun		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase kecepatan respon kurang dari 24 Jam untuk setiap status darurat bencana		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase kejadian kebakaran yang tertangani		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Lingkungan Hidup	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)		
				Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu		
				Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan		
				Dinas Lingkungan Hidup	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)		
				Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase kelurahan berseri		
				Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase sampah tertangani		
				Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R		
				Dinas Lingkungan Hidup	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
			Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase penerbitan dokumen KK		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase penerbitan dokumen akta kematian		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase kelurahan tertib administrasi		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase diseminasi dan layanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang ditetapkan		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Sekretariat Daerah	
			n		
				Sekretariat Daerah	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indek kepuasan masyarakat		
				Sekretariat DPRD	
			Indek Kepuasan Masyarakat		
				Sekretariat DPRD	
			Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat		
				Sekretariat DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD		
				Sekretariat DPRD	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan		
				Sekretariat DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Capaian Sasaran RPJMD		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase hasil pengendalian yang ditindaklanjuti		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu		
				Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 %		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase perangkat daerah yang penyerapan angggarannya di atas 85%		
				Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase tertib perencanaan keuangan daerah		
				Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi		
				Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah		
				Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Peningkatan target pendapatan pajak daerah		
				Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase data kepegawaian yang valid		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			IKM		
				Inspektorat	
			INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		
				Inspektorat	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)		
				Inspektorat	
			Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1		
				Inspektorat	
			Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2		
				Inspektorat	
			Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1		
				Inspektorat	
			Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2		
				Inspektorat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Kepanjenkidul	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			Jumlah Dokumen IKM yang tersusun		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			Jumlah IKM yang tersusun		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			Nilai Indeks Kepuasan Mayarakat		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Sukorejo	
			Indek Kepuasaan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Sukorejo	
			Indek Kepuasan Masyarakat		
				Kecamatan Sukorejo	
			Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Sukorejo	
			Indeks Kepuasaan MAsyarakat (IKM)		
				Kecamatan Sukorejo	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Sukorejo	
			Indeks Kepasan Masyarakat		
				Kecamatan Sananwetan	
			indeks kepuasan masyarakat		
				Kecamatan Sananwetan	
			Indeks kepuasan masyarakat		
				Kecamatan Sananwetan	
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Kecamatan Sananwetan	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Sananwetan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase layanan kecamatan tepat waktu		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			Persentase Pelayanan Kecamatan Tepat waktu		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			Presentase Pelayanan Kecamatan Tepat Waktu		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			Persentase layanan kecamatan tepat waktu		
				Kecamatan Sukorejo	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu		
				Kecamatan Sukorejo	
			Persentase layanan kecamatan tepat waktu		
				Kecamatan Sananwetan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			Persentase RT berdaya		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang di tindak lanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	
			Persentase hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase RT Berdaya		
				Kecamatan Sukorejo	
			Presentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	
			Presentase RT Berdaya		
				Kecamatan Sukorejo	
			. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sananwetan	
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sananwetan	
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindak lanjuti		
				Kecamatan Sananwetan	
			Persentase rt berdaya		
				Kecamatan Sananwetan	
			Persentase RT berdaya		
				Kecamatan Sananwetan	
			Persentase RT Berdaya		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Sananwetan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			Presentase koordinasi pemerintahan umum bidang pembangunan, ketertiban dan ketentraman umum yang dilaksanakan sesuai standart		
				Kecamatan Kepanjenkidul	
			Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	
			Persentase Koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	
			Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sananwetan	
			Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindak lanjuti		
				Kecamatan Sananwetan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase Partai Politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Sebagai breakdown dari tema nasional sesuai RKP Tahun 2023 dan menindaklanjuti amanat arah pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merumuskan tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2023 "***Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut Era Industry Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro guna Meningkatakan Kesejahteraan Masyarakat***". Lebih detail, tema RKPD tahun 2023 Provinsi Jawa Timur dirinci dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Prioritas Jatim 1:
   Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata
2. Prioritas Jatim 2:
   Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur
3. Prioritas Jatim 3:
   Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan
4. Prioritas Jatim 4:
   Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya local
5. Prioritas Jatim 5:
   Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi
6. Prioritas Jatim 6:
   Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
7. Prioritas Jatim 7:
   Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Blitar dengan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disajikan secara rinci pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
53	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.231.221.584
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Angka ketersediaan energi perkapita/hari		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	502.924.977
			Angka ketersediaan energi perkapita/ hari		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	111.173.949
			Angka konsumsi energi per kapita		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	614.098.926
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase balita rawan pangan yang tertangani		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	53.677.450
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Tingkat keamanan pangan segar (%)		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.456.775
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	4.319.414.885
			Indeks Kepuasan Masyarakat0		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	127.470.870
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	322.169.808
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi0		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	22.668.589
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	77.761.092
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	494.199.862
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Persentase Koperasi yang mengalami peningkatan volume usaha		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	246.228.909
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	565.051.606
			Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	565.051.606
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase WUB yang berhasil dikembangkan		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	426.311.299
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.923.715.800
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	30.229.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	196.646.892
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase penerbitan izin sesuai SOP		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	449.266.333
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			"Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	372.021.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	260.835.757
			Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	260.835.757
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Volume penjualan hasil olahan perikanan (juta rupiah)		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	80.974.380
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.979.665.927
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	136.987.880
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang di kelola		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	190.304.186
			Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	460.729.756
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana obyek pariwisata		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	460.729.756

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	463.909.756
			Persentase Peningkatan Usaha Pariwisata		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	460.729.756
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	248.451.617
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.458.623
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	225.655.877
			Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	69.392.992
			Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	62.930.926
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.149.460
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28.018.530
			Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	39.343.180
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.306.067.441
			Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.306.067.441
			Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.306.067.441
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			IKM		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.007.218.364
			indeks Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	438.968.496
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	385.330.650
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.554.281.624
			Persentase usaha yang memperoleh pengembangan kapasitas		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.554.281.624
			persentse sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	766.807.492
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yg dilaporkan dan dipublikasikan		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	224.282.246
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			persentase alat UTTP bertanda tera sah		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	224.471.400
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			persentase peningkatan IKM		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.378.971.380
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Kepanjenkidul	2.093.370.499
			Persentase RT berdaya		
				Kecamatan Kepanjenkidul	7.156.737
			Persentase RT Berdaya		
				Kecamatan Kepanjenkidul	2.086.213.762
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sananwetan	2.666.016.671
			Persentase RT berdaya		
				Kecamatan Sananwetan	2.666.016.671
54	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	323.569.998
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.299.206.464

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.579.726.984
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	307.528.900
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.267.604.118
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.631.822.300
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.872.126.318

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase gedung pemerintahan yang dibangun		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.872.126.318
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase jalan dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.440.857.989
			Persentase jembatan dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.440.857.989
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	581.908.929
			Persentase Pekerjaan Konstruksi yang Sesuai Standar		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	150.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase ketersediaan dokumen tata ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.351.444.736

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	129.467.846
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100.000.000
			Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100.000.000
			Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100.000.000
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
			Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.750.000
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	329.149.400
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	331.633.515
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Dokumen IKM yang tersusun		
				Kecamatan Kepanjenkidul	19.875.338
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Kepanjenkidul	16.674.623
			Persentase RT Berdaya		
				Kecamatan Kepanjenkidul	16.674.623
55	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Dinas Pendidikan	38.342.764
			indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pendidikan	2.946.130

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Indek Kepuasan masyarakat IKM		
				Dinas Pendidikan	200.939.990
			Indek Kepuasan Masyarakat IKM		
				Dinas Pendidikan	4.664.356
			Indeks Kepuasan Masayarakat		
				Dinas Pendidikan	30.650.000
			indeks kepuasan masyarakat		
				Dinas Pendidikan	3.349.072
			Indeks Kepuasan masyarakat		
				Dinas Pendidikan	250.282.816
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Pendidikan	96.298.268
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pendidikan	9.582.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pendidikan	127.112.021.030
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Pendidikan	5.688.722.178
			Inseks kepuasan masyarakat (IKM)		
				Dinas Pendidikan	402.456.713
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertuntaskan sesuai hasil assesment		
				Dinas Pendidikan	21.943.966.621

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase angka kelulusan SD/MI		
				Dinas Pendidikan	21.943.966.621
			persentase angka kelulusan SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan	973.400.975
			Persentase angka kelulusan SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan	21.943.966.621
			Persentase Angka kelulusan SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan	1.157.421.541
			Persentase Angka Kelulusan SMP/Mts		
				Dinas Pendidikan	1.236.584.854
			Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan	30.544.319.442
			Persentase keberhasilan assesment anak berkebutuhan khusus usia sekolah		
				Dinas Pendidikan	3.920.032.508
			Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)		
				Dinas Pendidikan	21.943.966.621

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)		
				Dinas Pendidikan	973.400.975
			Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)		
				Dinas Pendidikan	29.900.553.579
			Persentasesatuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)		
				Dinas Pendidikan	643.765.863
			Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi Minimal B (akreditasi SMP/Mts)		
				Dinas Pendidikan	1.236.584.854
			Persentase Satuan Pendidikan Dasar Berakreditasi minimal B (SMP/MTs)		
				Dinas Pendidikan	1.157.421.541
			Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B		
				Dinas Pendidikan	55.969.412.261
			Persentase Satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti Korupsi		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pendidikan	21.943.966.621
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
			Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan		
				Dinas Pendidikan	924.238.574
			Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi		
				Dinas Pendidikan	924.238.574
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi amat baik		
				Dinas Pendidikan	8.760.815.995
			Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan		
				Dinas Pendidikan	8.760.815.995
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
			Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku		
				Dinas Pendidikan	27.011.774
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	173.067.176.267
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Kesehatan	27.377.077.653
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	16.169.503.561
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	43.389.607.928
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	6.394.052.600
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	53.165.058.889
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)		
				Dinas Kesehatan	43.389.607.928

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	24.892.956.251
			Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan		
				Dinas Kesehatan	49.783.660.528
			Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan		
				Dinas Kesehatan	9.775.450.961
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	6.394.052.600
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	9.775.450.961
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)		
				Dinas Kesehatan	43.389.607.928
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	6.394.052.600
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	9.775.450.961
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)		
				Dinas Kesehatan	43.389.607.928
			Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)		
				Dinas Kesehatan	59.559.111.489
			Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan		
				Dinas Kesehatan	59.559.111.489
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	59.559.111.489
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	43.389.607.928
			Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	8.640.542.397
			Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	7.223.333.764
			Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM) "		
				Dinas Kesehatan	305.627.400
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	9.365.450.961
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	6.804.052.600
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM) "		
				Dinas Kesehatan	305.627.400

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	43.389.607.928
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	49.783.660.528
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	9.775.450.961
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	43.389.607.928
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	16.169.503.561
			Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS		
				Dinas Kesehatan	8.044.451.591
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	43.389.607.928
			Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	6.394.052.600
			Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	9.775.450.961
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	43.389.607.928
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	4.394.052.600
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	2.000.000.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	9.775.450.961
			Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani		
				Dinas Kesehatan	59.559.111.489
			Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina		
				Dinas Kesehatan	53.165.058.889
			Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	59.559.111.489
			Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)		
				Dinas Kesehatan	6.394.052.600
			Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	9.775.450.961
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	49.004.103
			Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan		
				Dinas Kesehatan	266.034.400
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri		
				Dinas Kesehatan	2.754.101.585
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Sosial	4.418.454.115
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Sosial	4.075.267.029
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		
				Dinas Sosial	1.427.266.448
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Peningkatan PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial		
				Dinas Sosial	955.903.751
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase Peningkatan PMKS terlatih		
				Dinas Sosial	18.437.454.778
			Persentase penurunan Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial		
				Dinas Sosial	18.437.454.778
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota		
				Dinas Sosial	148.481.093
			Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)		
				Dinas Sosial	200.035.433
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			Persentase TMP dalam kondisi baik		
				Dinas Sosial	47.756.314

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	1.599.999.913
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	215.810.960
			Persentase pencari kerja yang ditempatkan		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	215.810.960
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	22.828.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.737.224.201
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.433.072.501
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	806.829.865
			Persentase Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	806.829.865
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Cakupan Fasilitas Olahraga sesuai standart		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.324.969.765
			Cakupan Fasilitas Olahraga Sesuai Standart		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5.520.760.453
			Cakupan Pelatih yang tersertifikasi		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.324.969.765
			Cakupan Pelatih yang Tersertifikasi		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	337.519.730
			Cakupan Pelatih yang Tersetifikasi		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5.183.240.723
			Cakupan Pembinaan Atlit Muda		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	6.845.730.218
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase Kelompok Pramuka Aktif		
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	178.585.295
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.470.903.876
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.654.979.118
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	826.635.812
			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	826.635.812
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Dokumen IKM yang tersusun		
				Kecamatan Kepanjenkidul	34.086.246
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Kepanjenkidul	110.018.936
			Persentase RT berdaya		
				Kecamatan Kepanjenkidul	110.018.936
			1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	803.564.318

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			2. Persentase RT Berdaya		
				Kecamatan Sukorejo	803.564.318
			Persentase hasil koordinasi bidang pembendayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	2.327.893.000
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang di tindak lanjut		
				Kecamatan Sukorejo	976.847.111
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	6.090.975.933
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	836.040.069
			Persentase hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	110.020.863
			Persentase RT Berdaya		
				Kecamatan Sukorejo	6.500.351.449
			Preesentase RT Berdaya		
				Kecamatan Sukorejo	2.052.537.775

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Presentase RT Berdaya		
				Kecamatan Sukorejo	1.812.887.180
			Presentasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	23.999.428
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sananwetan	4.081.623.616
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindak lanjuti		
				Kecamatan Sananwetan	1.428.249.242
			Persentase rt berdaya		
				Kecamatan Sananwetan	1.925.469.766
			Persentase RT berdaya		
				Kecamatan Sananwetan	3.630.596.039
			Persentase RT Berdaya		
				Kecamatan Sananwetan	3.584.403.092
			Presentasi hasil koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan yang ditindak lanjuti		
				Kecamatan Sananwetan	3.630.596.039
56	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.358.026.772
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	637.490.766
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase komposisi perempuan di sektor bisnis		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	606.269.135
			Persentase PD yang melaksanakan PPRG		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	87.640.770
			Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	518.628.365
			Persentase perempuan pengambil keputusan publik		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	865.338.181
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	392.556.529
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Persentase kelembagaan pemenuhan hak anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	48.689.151

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26.699.809
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	440.142.415
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Rata-rata usia kawin pertama wanita		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	215.155.574
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.644.550.166
			Persentase peserta KB aktif		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.077.306.805
			Persentase peserta KB Aktif		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	567.243.361
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Persentase anggota Kelompok Tribina & UPPKS yang ber-KB		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	789.016.524
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase budaya lokal yang dikembangkan		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	459.239.455

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Persentase kesejarahan yang dikembangkan		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	653.535.600
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan		
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	260.502.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Dokumen IKM yang tersusun		
				Kecamatan Kepanjenkidul	9.500.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Kepanjenkidul	77.477.679
57	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM)		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50.275.080
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.759.760.825
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.120.814.020
			Persentase tingkat hunian Rusunawa		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.120.814.020
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.836.434.109
			Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.836.434.109
			Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.836.434.109
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.393.950.012
			Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.393.950.012
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.397.189.231
			Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.397.189.231
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Perhubungan	7.051.543.686

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			IKM layanan angkutan sekolah gratis		
				Dinas Perhubungan	9.166.921.952
			IKM terhadap layanan parkir tepi jalan umum		
				Dinas Perhubungan	1.289.487.403
			IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor		
				Dinas Perhubungan	7.824.145.632
			IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum		
				Dinas Perhubungan	7.586.367.215
			Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik		
				Dinas Perhubungan	7.586.367.215
			Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas		
				Dinas Perhubungan	9.778.280.992
			Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik		
				Dinas Perhubungan	7.881.034.126
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Volume penjualan hasil olahan perikanan (juta rupiah)		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.263.634.119
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar)		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	37.658.413
			Persentase pengawasan peredaran obat hewan		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	115.859.596
			Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	169.395.818
			Persentase sarana pertanian yang tersedia		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	115.859.596
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	887.353.475

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase produk RPH yang dijamin ASUH		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	37.352.056
			Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	850.001.419
58	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.902.706.056
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Jumlah kelurahan tangguh bencana kategori Madya		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	195.089.658
			Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	934.044.906
			Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	554.596.488
			Persentase kecepatan respon kurang dari 24 Jam untuk setiap status darurat bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	574.538.076
			Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	359.506.830
			Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.237.682.213
			Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.129.134.564
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase kejadian kebakaran yang tertangani		
				Satuan Polisi Pamong Praja	716.562.401

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Lingkungan Hidup	7.426.244.761
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia		
				Dinas Lingkungan Hidup	405.141.904
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)		
				Dinas Lingkungan Hidup	824.210.967
			Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu		
				Dinas Lingkungan Hidup	824.210.967
			Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu		
				Dinas Lingkungan Hidup	824.210.967
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota		
				Dinas Lingkungan Hidup	2.471.388.917
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan		
				Dinas Lingkungan Hidup	13.968.612
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup	192.214.694
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina		
				Dinas Lingkungan Hidup	404.964.499
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)		
				Dinas Lingkungan Hidup	383.545.190
			Persentase kelurahan berseri		
				Dinas Lingkungan Hidup	383.545.190
			Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)		
				Dinas Lingkungan Hidup	383.545.190
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		
				Dinas Lingkungan Hidup	16.540.856
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase sampah tertangani		
				Dinas Lingkungan Hidup	11.345.602.260
			Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R		
				Dinas Lingkungan Hidup	11.345.602.260
59	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Satuan Polisi Pamong Praja	5.728.923.157
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan		
				Satuan Polisi Pamong Praja	4.651.611.063
			Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan		
				Satuan Polisi Pamong Praja	5.365.732.408
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.509.090.332
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase penerbitan dokumen KK		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.984.000
			Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	404.216.224
			Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	389.232.224
			Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	389.232.224
			Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.984.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase penerbitan dokumen akta kematian		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258.724.222

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258.724.222
			Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258.724.222
			Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258.724.222
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	736.947.306
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45.942.560
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase kelurahan tertib administrasi		
				Sekretariat Daerah	132.518.619
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	401.159.263
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase diseminasi dan layanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang ditetapkan		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.193.788.250
			Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.193.788.250
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.027.490.964

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Persentase implementasi persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	170.058.326
			Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	99.913.458
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	523.915.606
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Sekretariat Daerah	77.750.252
			n		
				Sekretariat Daerah	153.212.000
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Sekretariat Daerah	11.942.482.382

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku		
				Sekretariat Daerah	12.916.213.426
			Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik		
				Sekretariat Daerah	982.952.378
			Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi		
				Sekretariat Daerah	982.952.378
			Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik		
				Sekretariat Daerah	77.750.252
			Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi		
				Sekretariat Daerah	77.750.252
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif		
				Sekretariat Daerah	2.574.902.542
			Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi		
				Sekretariat Daerah	929.113.097

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti		
				Sekretariat Daerah	2.680.039.641
			Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti		
				Sekretariat Daerah	10.448.023.317
			Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		
				Sekretariat Daerah	10.448.023.317
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement		
				Sekretariat Daerah	929.183.448
			Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Sekretariat Daerah	203.608.620
			Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti		
				Sekretariat Daerah	939.039.946
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indek kepuasan masyarakat		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Sekretariat DPRD	125.931.900
			Indek Kepuasan Masyarakat		
				Sekretariat DPRD	17.745.893.764
			Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat		
				Sekretariat DPRD	3.029.199.473
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD		
				Sekretariat DPRD	8.881.257.010
			Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan		
				Sekretariat DPRD	6.036.897.267
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.895.125.979
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	142.560.000
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Indeks Kepuasan Masyarakat		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	56.950.072
			Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.871.077.093
			Persentase Capaian Sasaran RPJMD		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.814.127.021
			Persentase hasil pengendalian yang ditindaklanjuti		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	189.148.195
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Capaian Program Perangkat Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	360.881.720
			Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	194.678.020

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	205.078.461
			Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD (Tujuan, Program, Kegiatan, dan Indikator)		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	360.881.720
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	10.282.467.391
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu		
				Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	6.625.798.764
			Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 %		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	2.625.798.764
			Persentase perangkat daerah yang penyerapan angggarannya di atas 85%		
				Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	149.226.320
			Persentase tertib perencanaan keuangan daerah		
				Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	2.775.025.084
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi		
				Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	2.252.416.557
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah		
				Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	3.264.747.195
			Persentase Peningkatan target pendapatan pajak daerah		
				Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	3.264.747.195
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.299.916.183
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.998.766.151
			Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.998.766.151
			Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.998.766.151
			Persentase data kepegawaian yang valid		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.998.766.151

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.998.766.151
			Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.998.766.151
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	943.914.163
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	728.331.743
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			IKM		
				Inspektorat	7.461.630.163

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		
				Inspektorat	79.070.186
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)		
				Inspektorat	2.094.184.606
			Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1		
				Inspektorat	2.094.184.606
			Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2		
				Inspektorat	2.094.184.606
			Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1		
				Inspektorat	2.094.184.606
			Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2		
				Inspektorat	2.094.184.606
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)		
				Inspektorat	595.444.620

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)		
				Inspektorat	595.444.620
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		
				Inspektorat	595.444.620
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Kecamatan Kepanjenkidul	60.315.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Kepanjenkidul	127.535.838
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Kepanjenkidul	314.167.588
			Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)		
				Kecamatan Kepanjenkidul	3.346.100
			Jumlah Dokumen IKM yang tersusu		
				Kecamatan Kepanjenkidul	6.000.000
			Jumlah dokumen IKM yang tersusun		
				Kecamatan Kepanjenkidul	9.493.182.506
			Jumlah Dokumen IKM yang tersusun		
				Kecamatan Kepanjenkidul	115.359.313
			Jumlah IKM yang tersusun		
				Kecamatan Kepanjenkidul	9.380.712

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Kecamatan Kepanjenkidul	11.234.374.542
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Kepanjenkidul	60.214.765
			Nilai Indeks Kepuasan Mayarakat		
				Kecamatan Kepanjenkidul	124.900.381
			1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Sukorejo	769.232.178
			Indek Kepuasaan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Sukorejo	3.360.000
			Indek Kepuasan Masyarakat		
				Kecamatan Sukorejo	50.781.624
			Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Sukorejo	132.363.212
			Indeks Kepuasaan MAsyarakat (IKM)		
				Kecamatan Sukorejo	91.954.437
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Kecamatan Sukorejo	171.526.944
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Sukorejo	12.108.652.062
			Jumlah dokumen IKM yang tersusun		
				Kecamatan Sukorejo	59.854.883

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase pelayanan yang sesuai standart		
				Kecamatan Sukorejo	42.476.483
			Indeks Kepasan Masyarakat		
				Kecamatan Sananwetan	401.666
			indeks kepuasan masyarakat		
				Kecamatan Sananwetan	13.579.300
			Indeks kepuasan masyarakat		
				Kecamatan Sananwetan	107.515.257
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
				Kecamatan Sananwetan	15.952.538.038
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Kecamatan Sananwetan	207.641.711
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase layanan kecamatan tepat waktu		
				Kecamatan Kepanjenkidul	600.457.443
			Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu		
				Kecamatan Kepanjenkidul	50.460.383
			Persentase Pelayanan Kecamatan Tepat waktu		
				Kecamatan Kepanjenkidul	29.311.371
			Presentase Pelayanan Kecamatan Tepat Waktu		
				Kecamatan Kepanjenkidul	24.176.758

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase layanan kecamatan tepat waktu		
				Kecamatan Sukorejo	382.590.207
			Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu		
				Kecamatan Sukorejo	478.445.430
			Persentase layanan kecamatan tepat waktu		
				Kecamatan Sananwetan	829.921.534
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan sesuai standar		
				Kecamatan Kepanjenkidul	1.831.912.869
			2. Persentase rt berdaya		
				Kecamatan Kepanjenkidul	1.687.915.446
			2. Persentase RT Berdaya		
				Kecamatan Kepanjenkidul	143.997.423
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Kepanjenkidul	10.442.380.070
			Persentase RT berdaya		
				Kecamatan Kepanjenkidul	6.459.753.257
			Persentase RT Berdaya		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Kepanjenkidul	2.241.421.372
			Presentase RT Berdaya		
				Kecamatan Kepanjenkidul	1.882.722.333
			Persentase hasil koordinasi bidang pembendayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	36.702.446
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	980.649.286
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang di tindak lanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	207.714.391
			Persentase hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	5.047.566
			Persentase RT Berdaya		
				Kecamatan Sukorejo	2.005.614.898
			Presentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	161.393.053
			Presentase RT Berdaya		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Sukorejo	369.107.444
			Presentasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	983.215.600
			. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sananwetan	69.606.517
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sananwetan	5.226.618.669
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindak lanjuti		
				Kecamatan Sananwetan	22.940.919
			Persentase rt berdaya		
				Kecamatan Sananwetan	4.032.422.716
			Persentase RT berdaya		
				Kecamatan Sananwetan	1.105.318.307
			Persentase RT Berdaya		
				Kecamatan Sananwetan	53.812.207
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Kepanjenkidul	492.411.897
			Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Kepanjenkidul	43.713.773
			Presentase koordinasi pemerintahan umum bidang pembangunan, ketertiban dan ketentraman umum yang dilaksanakan sesuai standart		
				Kecamatan Kepanjenkidul	33.538.418
			Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	554.382.372
			Persentase Koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	44.527.015
			Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti		
				Kecamatan Sukorejo	37.475.780
			Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Sananwetan	530.984.516
			Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindak lanjuti		
				Kecamatan Sananwetan	43.153.014
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.781.672.529
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase Kampung Berkarakter Pancasila		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	544.976.784
			Persentase penyelesaian konflik keagamaan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	544.976.784
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase Partai Politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.242.706.865
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.883.107
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	281.569.384
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.718.094.166

3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

Dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021–2026, telaahan kebijakan nasional dan provinsi, serta kinerja pembangunan tahun sebelumnya, maka tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2023 adalah ***"Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Normalisasi Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional berbasis Teknologi Informasi",*** yang dijabarkan pada 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu:

1. Prioritas Daerah 1:
   Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
2. Prioritas Daerah 2:
   Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital untuk Normalisasi Ekonomi
3. Prioritas Daerah 3:
   Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
4. Prioritas Daerah 4:
   Penguatan Kualitas Pendidikan, Sistem Kesehatan dan Sumber Daya Manusia
5. Prioritas Daerah 5:
   Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi
6. Prioritas Daerah 6:
   Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis.

Dari uraian tentang tema pembangunan dan prioritas pada level nasional, provinsi, dan kabupaten sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat dilihat keselaran tema dan program prioritas RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur, dan RKPD Kota Blitar tahun 2023 dalam tabel berikut ini:

Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Tema dan Prioritas Nasional	Tema dan Prioritas Provinsi Jawa Timur	Tema dan Prioritas Kota Blitar
Tema Nasional: Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Tema Provinsi: Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut Era Industry Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tema Kota Blitar: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Normalisasi Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional berbasis Teknologi Informasi
Prioritas Nasional 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Prioritas Jatim 1: Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Prioritas Daerah 2: Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital untuk Normalisasi Ekonomi
Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Prioritas Jatim 2: Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Prioritas Daerah 5: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi
Prioritas Nasional 3: Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing	Prioritas Jatim 3: Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Prioritas Daerah 1: Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Prioritas Daerah 4: Penguatan Kualitas Pendidikan, Sistem Kesehatan dan Sumber Daya Manusia

Tema dan Prioritas Nasional	Tema dan Prioritas Provinsi Jawa Timur	Tema dan Prioritas Kota Blitar
Prioritas Nasional 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Prioritas Jatim 4: Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Prioritas Daerah 6: Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis
Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Prioritas Jatim 5: Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Prioritas Daerah 5: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi
Prioritas Nasional 6: Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Prioritas Jatim 6: Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Prioritas Daerah 5: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi
Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan public	Prioritas Jatim 7: Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat	Prioritas Daerah 3: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Prioritas Daerah 6: Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis.

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023 disajikan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran						
		Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai penurunan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks gini sesuai target					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Sosial	4.418.454.115	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			
					Dinas Sosial	4.075.267.029	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			
					Dinas Sosial	1.427.266.448	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase Peningkatan PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial			
					Dinas Sosial	955.903.751	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Peningkatan PMKS terlatih			
					Dinas Sosial	18.437.454.778	
				Persentase penurunan Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial			
					Dinas Sosial	18.437.454.778	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota			
					Dinas Sosial	148.481.093	
				Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)			
					Dinas Sosial	200.035.433	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
				Persentase TMP dalam kondisi baik			
					Dinas Sosial	47.756.314	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	1.599.999.913	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	215.810.960	
				Persentase pencari kerja yang ditempatkan			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	215.810.960	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	22.828.400	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	156.354.855	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Jumlah IKM yang tersusun			
					Kecamatan Kepanjenkidul	8.510.857	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti			
					Kecamatan Kepanjenkidul	7.035.755.651	
				Persentase RT berdaya			
					Kecamatan Kepanjenkidul	2.257.262.333	
				Persentase RT Berdaya			
					Kecamatan Kepanjenkidul	3.083.040.985	
				Presentase RT Berdaya			
					Kecamatan Kepanjenkidul	1.882.722.333	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti			
					Kecamatan Sukorejo	803.564.318	
				2. Persentase RT Berdaya			
					Kecamatan Sukorejo	803.564.318	
				Persentase hasil koordinasi bidang pembendayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti			
					Kecamatan Sukorejo	2.364.595.446	
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang di tindak lanjut			
					Kecamatan Sukorejo	976.847.111	
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti			
					Kecamatan Sukorejo	6.284.054.304	
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti			
					Kecamatan Sukorejo	836.040.069	
				Persentase RT Berdaya			
					Kecamatan Sukorejo	7.603.327.003	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Preesentase RT Berdaya			
					Kecamatan Sukorejo	2.052.537.775	
				Presentase RT Berdaya			
					Kecamatan Sukorejo	1.812.887.180	
				Presentasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti			
					Kecamatan Sukorejo	1.007.215.028	
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti			
					Kecamatan Sananwetan	7.367.439.537	
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindak lanjuti			
					Kecamatan Sananwetan	1.451.190.161	
				Persentase rt berdaya			
					Kecamatan Sananwetan	2.545.269.016	
				Persentase RT berdaya			
					Kecamatan Sananwetan	6.296.612.710	
				Persentase RT Berdaya			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Sananwetan	3.607.344.011	
				Presentasi hasil koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan yang ditindak lanjuti			
					Kecamatan Sananwetan	3.630.596.039	
2	Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan untuk Normalisasi Ekonomi Berbasis Digital						
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, yang ditandai dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB, Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB, Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif, Persentase nilai tambah bruto koperasi dan usaha mikro, PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Persentase peningkatan nilai investasi daerah yang sesuai target					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.231.221.584	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Angka ketersediaan energi perkapita/hari			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	502.924.977	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Angka ketersediaan energi perkapita/ hari			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	111.173.949	
				Angka konsumsi energi per kapita			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	614.098.926	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
				Persentase balita rawan pangan yang tertangani			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	53.677.450	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
				Tingkat keamanan pangan segar (%)			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.456.775	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	4.319.414.885	
				Indeks Kepuasan Masyarakat0			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	127.470.870	
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				
				Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	322.169.808	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
				Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi0			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	22.668.589	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
				Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	77.761.092	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
				Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	494.199.862	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
				Persentase Koperasi yang mengalami peningkatan volume usaha			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	246.228.909	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
				Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	565.051.606	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	565.051.606	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
				Persentase WUB yang berhasil dikembangkan			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	426.311.299	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.923.715.800	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
				Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi			
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	30.229.000	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan			
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	196.646.892	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				Persentase penerbitan izin sesuai SOP			
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	449.266.333	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
				"Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	372.021.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	260.835.757	
				Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	260.835.757	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
				Volume penjualan hasil olahan perikanan (juta rupiah)			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.344.608.499	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.979.665.927	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	136.987.880	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang di kelola			
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	190.304.186	
				Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	460.729.756	
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana obyek pariwisata			
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	460.729.756	
				Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno			
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	463.909.756	
				Persentase Peningkatan Usaha Pariwisata			
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	460.729.756	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan			
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	248.451.617	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan			
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.458.623	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Persentase pengawasan peredaran obat hewan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	50.005.295	
				Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	50.005.295	
				Persentase sarana pertanian yang tersedia			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	50.005.295	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	225.655.877	
				Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	69.392.992	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	62.930.926	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.149.460	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
				Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28.018.530	
				Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	39.343.180	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.306.067.441	
				Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.306.067.441	
				Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.306.067.441	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				IKM			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.007.218.364	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				indeks Kepuasan Masyarakat			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	438.968.496	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	385.330.650	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
				Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.554.281.624	
				Persentase usaha yang memperoleh pengembangan kapasitas			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.554.281.624	
				persentse sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	766.807.492	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
				persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yg dilaporkan dan dipublikasikan			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	224.282.246	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
				persentase alat UTTP bertanda tera sah			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	224.471.400	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				persentase peningkatan IKM			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.378.971.380	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Kepanjenkidul	23.831.360	
				Persentase RT berdaya			
					Kecamatan Kepanjenkidul	7.156.737	
				Persentase RT Berdaya			
					Kecamatan Kepanjenkidul	16.674.623	
3	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi						
		Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi yang ditandai dengan tercapainya target Indeks reformasi birokrasi, nilai SAKIP, status EKPD, opini BPK atas LKPD, indeks kepuasan masyarakat, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, indeks profesionalitas pegawai dan indeks kearsipan					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.509.090.332	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
				Persentase penerbitan dokumen KK			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.984.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	404.216.224	
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	389.232.224	
				Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	389.232.224	
				Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.984.000	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
				Persentase penerbitan dokumen akta kematian			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258.724.222	
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258.724.222	
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258.724.222	
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258.724.222	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	736.947.306	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
				Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45.942.560	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	376.159.263	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Persentase diseminasi dan layanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang ditetapkan			
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.193.788.250	
				Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah			
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.193.788.250	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.027.490.964	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
				Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik			
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	327.227.931	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Persentase implementasi persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	170.058.326	
				Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	99.913.458	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	523.915.606	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Sekretariat Daerah	77.750.252	
				n			
					Sekretariat Daerah	153.212.000	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Sekretariat Daerah	11.942.482.382	
				Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku			
					Sekretariat Daerah	12.916.213.426	
				Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik			
					Sekretariat Daerah	982.952.378	
				Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi			
					Sekretariat Daerah	982.952.378	
				Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sekretariat Daerah	77.750.252	
				Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi			
					Sekretariat Daerah	77.750.252	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif			
					Sekretariat Daerah	2.574.902.542	
				Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi			
					Sekretariat Daerah	929.113.097	
				Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti			
					Sekretariat Daerah	2.680.039.641	
				Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti			
					Sekretariat Daerah	10.448.023.317	
				Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti			
					Sekretariat Daerah	10.448.023.317	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement			
					Sekretariat Daerah	929.183.448	
				Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti			
					Sekretariat Daerah	203.608.620	
				Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti			
					Sekretariat Daerah	939.039.946	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indek kepuasan masyarakat			
					Sekretariat DPRD	125.931.900	
				Indek Kepuasan Masyarakat			
					Sekretariat DPRD	17.745.893.764	
				Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat			
					Sekretariat DPRD	3.029.199.473	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD			
					Sekretariat DPRD	8.881.257.010	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan			
					Sekretariat DPRD	6.036.897.267	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.895.125.979	
				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	142.560.000	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	56.950.072	
				Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.685.374.584	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Capaian Sasaran RPJMD			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.628.424.512	
				Persentase hasil pengendalian yang ditindaklanjuti			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	189.148.195	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase Capaian Program Perangkat Daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	360.881.720	
				Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	194.678.020	
				Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	205.078.461	
				Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD (Tujuan, Program, Kegiatan, dan Indikator)			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	360.881.720	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	10.270.506.391	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu			
					Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	6.790.321.854	
				Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 %			
					Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	2.790.321.854	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase perangkat daerah yang penyerapan angggarannya di atas 85%			
					Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	149.226.320	
				Persentase tertib perencanaan keuangan daerah			
					Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	2.939.548.174	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi			
					Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	2.252.416.557	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
				Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah			
					Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	3.264.747.195	
				Persentase Peningkatan target pendapatan pajak daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	3.264.747.195	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.299.916.183	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.998.766.151	
				Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.998.766.151	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.998.766.151	
				Persentase data kepegawaian yang valid			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.998.766.151	
				Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.998.766.151	
				Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.998.766.151	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	943.914.163	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	673.348.347	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				IKM			
					Inspektorat	7.461.630.163	
				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT			
					Inspektorat	79.070.186	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)			
					Inspektorat	2.094.184.606	
				Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1			
					Inspektorat	2.094.184.606	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2			
					Inspektorat	2.094.184.606	
				Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1			
					Inspektorat	2.094.184.606	
				Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2			
					Inspektorat	2.094.184.606	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)			
					Inspektorat	595.444.620	
				Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)			
					Inspektorat	595.444.620	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti			
					Inspektorat	595.444.620	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					Kecamatan Kepanjenkidul	60.315.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Kecamatan Kepanjenkidul	127.535.838	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Kecamatan Kepanjenkidul	316.095.406	
				Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)			
					Kecamatan Kepanjenkidul	3.346.100	
				Jumlah Dokumen IKM yang tersusu			
					Kecamatan Kepanjenkidul	25.280.000	
				Jumlah dokumen IKM yang tersusun			
					Kecamatan Kepanjenkidul	9.493.182.506	
				Jumlah Dokumen IKM yang tersusun			
					Kecamatan Kepanjenkidul	74.238.433	
				Jumlah IKM yang tersusun			
					Kecamatan Kepanjenkidul	76.389.489	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			
					Kecamatan Kepanjenkidul	15.234.374.543	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Kecamatan Kepanjenkidul	169.189.001	
				Nilai Indeks Kepuasan Mayarakat			
					Kecamatan Kepanjenkidul	124.900.381	
				1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Kecamatan Sukorejo	769.232.178	
				Indek Kepuasaan Masyarakat (IKM)			
					Kecamatan Sukorejo	3.360.000	
				Indek Kepuasan Masyarakat			
					Kecamatan Sukorejo	50.781.624	
				Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)			
					Kecamatan Sukorejo	132.363.212	
				Indeks Kepuasaan MAsyarakat (IKM)			
					Kecamatan Sukorejo	91.954.437	
				Indeks Kepuasan Masyarakat			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Sukorejo	171.526.944	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Kecamatan Sukorejo	12.108.652.062	
				Jumlah dokumen IKM yang tersusun			
					Kecamatan Sukorejo	59.854.883	
				Persentase pelayanan yang sesuai standart			
					Kecamatan Sukorejo	42.476.483	
				Indeks Kepasan Masyarakat			
					Kecamatan Sananwetan	401.666	
				indeks kepuasan masyarakat			
					Kecamatan Sananwetan	13.579.300	
				Indeks kepuasan masyarakat			
					Kecamatan Sananwetan	107.515.257	
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					Kecamatan Sananwetan	15.875.176.193	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Sananwetan	207.641.711	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Persentase layanan kecamatan tepat waktu			
					Kecamatan Kepanjenkidul	550.842.968	
				Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu			
					Kecamatan Kepanjenkidul	20.864.220	
				Persentase Pelayanan Kecamatan Tepat waktu			
					Kecamatan Kepanjenkidul	29.311.371	
				Presentase Pelayanan Kecamatan Tepat Waktu			
					Kecamatan Kepanjenkidul	24.176.758	
				Persentase layanan kecamatan tepat waktu			
					Kecamatan Sukorejo	382.590.207	
				Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu			
					Kecamatan Sukorejo	478.445.430	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase layanan kecamatan tepat waktu			
					Kecamatan Sananwetan	829.921.534	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan sesuai standar			
					Kecamatan Kepanjenkidul	1.831.912.869	
				2. Persentase rt berdaya			
					Kecamatan Kepanjenkidul	1.687.915.446	
				2. Persentase RT Berdaya			
					Kecamatan Kepanjenkidul	143.997.423	
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti			
					Kecamatan Kepanjenkidul	4.947.958.864	
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar			
					Kecamatan Kepanjenkidul	7.561.700	
				Persentase RT berdaya			
					Kecamatan Kepanjenkidul	4.309.120.540	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase RT Berdaya			
					Kecamatan Kepanjenkidul	638.838.324	
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti			
					Kecamatan Sukorejo	787.570.915	
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang di tindak lanjuti			
					Kecamatan Sukorejo	207.714.391	
				Persentase hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti			
					Kecamatan Sukorejo	115.068.429	
				Persentase RT Berdaya			
					Kecamatan Sukorejo	902.639.344	
				Presentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti			
					Kecamatan Sukorejo	161.393.053	
				Presentase RT Berdaya			
					Kecamatan Sukorejo	369.107.444	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti			
					Kecamatan Sananwetan	69.606.517	
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti			
					Kecamatan Sananwetan	4.733.552.902	
				Persentase rt berdaya			
					Kecamatan Sananwetan	3.412.623.466	
				Persentase RT berdaya			
					Kecamatan Sananwetan	1.105.318.307	
				Persentase RT Berdaya			
					Kecamatan Sananwetan	30.871.288	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti			
					Kecamatan Kepanjenkidul	492.411.897	
				Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Kepanjenkidul	43.713.773	
				Presentase koordinasi pemerintahan umum bidang pembangunan, ketertiban dan ketentraman umum yang dilaksanakan sesuai standart			
					Kecamatan Kepanjenkidul	33.538.418	
				Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti			
					Kecamatan Sukorejo	554.382.372	
				Persentase Koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti			
					Kecamatan Sukorejo	44.527.015	
				Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti			
					Kecamatan Sukorejo	37.475.780	
				Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti			
					Kecamatan Sananwetan	530.984.516	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindak lanjuti			
					Kecamatan Sananwetan	43.153.014	
4	Penguatan Kualitas Pendidikan, Sistem Kesehatan dan Sumber Daya Manusia						
		Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing sumber daya manusia yang ditandainya dengan tercapainya target IPM, indeks pendidikan, angka harapan hidup, indeks minat baca, presentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah, peningkatan prestasi olahraga dalam even regional, laju pertumbuhan penduduk dan tingkat kegemaran membaca masyarakat					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Dinas Pendidikan	38.342.764	
				indek Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Pendidikan	2.946.130	
				Indek Kepuasan masyarakat IKM			
					Dinas Pendidikan	200.939.990	
				Indek Kepuasan Masyarakat IKM			
					Dinas Pendidikan	4.664.356	
				Indeks Kepuasan Masayarakat			
					Dinas Pendidikan	30.650.000	
				indeks kepuasan masyarakat			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pendidikan	3.349.072	
				Indeks Kepuasan masyarakat			
					Dinas Pendidikan	250.282.816	
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					Dinas Pendidikan	96.298.268	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Pendidikan	9.582.000	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Pendidikan	127.112.021.030	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Pendidikan	5.688.722.178	
				Inseks kepuasan masyarakat (IKM)			
					Dinas Pendidikan	402.456.713	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertuntaskan sesuai hasil assesment			
					Dinas Pendidikan	21.901.526.546	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase angka kelulusan SD/MI			
					Dinas Pendidikan	21.901.526.546	
				persentase angka kelulusan SMP/MTs			
					Dinas Pendidikan	973.400.975	
				Persentase angka kelulusan SMP/MTs			
					Dinas Pendidikan	21.901.526.546	
				Persentase Angka kelulusan SMP/MTs			
					Dinas Pendidikan	1.157.421.541	
				Persentase Angka Kelulusan SMP/Mts			
					Dinas Pendidikan	1.236.584.854	
				Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs			
					Dinas Pendidikan	30.544.319.442	
				Persentase keberhasilan assesment anak berkebutuhan khusus usia sekolah			
					Dinas Pendidikan	3.920.032.508	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)			
					Dinas Pendidikan	21.901.526.546	
				persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)			
					Dinas Pendidikan	973.400.975	
				Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)			
					Dinas Pendidikan	29.900.553.579	
				Persentasesatuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)			
					Dinas Pendidikan	643.765.863	
				Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi Minimal B (akreditasi SMP/Mts)			
					Dinas Pendidikan	1.236.584.854	
				Persentase Satuan Pendidikan Dasar Berakreditasi minimal B (SMP/MTs)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pendidikan	1.157.421.541	
				Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B			
					Dinas Pendidikan	55.884.532.111	
				Persentase Satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti Korupsi			
					Dinas Pendidikan	21.901.526.546	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
				Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan			
					Dinas Pendidikan	924.238.574	
				Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi			
					Dinas Pendidikan	924.238.574	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
				persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi amat baik			
					Dinas Pendidikan	8.760.815.995	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan			
					Dinas Pendidikan	8.760.815.995	
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				
				Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku			
					Dinas Pendidikan	27.011.774	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Kesehatan	173.067.176.267	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Kesehatan	27.377.077.653	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	16.117.458.118	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	43.389.607.928	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	6.342.007.157	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	53.165.058.889	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)			
					Dinas Kesehatan	43.389.607.928	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	24.840.910.808	
				Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan			
					Dinas Kesehatan	49.731.615.085	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan			
					Dinas Kesehatan	9.775.450.961	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	6.342.007.157	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	9.775.450.961	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)			
					Dinas Kesehatan	43.389.607.928	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	6.342.007.157	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	9.775.450.961	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)			
					Dinas Kesehatan	43.389.607.928	
				Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)			
					Dinas Kesehatan	59.507.066.046	
				Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan			
					Dinas Kesehatan	59.507.066.046	
				Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	59.507.066.046	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	43.389.607.928	
				Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	8.640.542.397	
				Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	7.171.288.321	
				Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM) "			
					Dinas Kesehatan	305.627.400	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	9.365.450.961	
				Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	6.752.007.157	
				Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM) "			
					Dinas Kesehatan	305.627.400	
				Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	43.389.607.928	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	49.731.615.085	
				Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	9.775.450.961	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	43.389.607.928	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	16.117.458.118	
				Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS			
					Dinas Kesehatan	8.044.451.591	
				Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	43.389.607.928	
				Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	6.342.007.157	
				Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	9.775.450.961	
				Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	43.389.607.928	
				Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	4.394.052.600	
				Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	1.947.954.557	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	9.775.450.961	
				Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani			
					Dinas Kesehatan	59.507.066.046	
				Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina			
					Dinas Kesehatan	53.165.058.889	
				Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	59.507.066.046	
				Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	6.342.007.157	
				Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)			
					Dinas Kesehatan	9.775.450.961	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	257.800.220	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	49.004.103	
				Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan			
					Dinas Kesehatan	266.034.400	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri			
					Dinas Kesehatan	2.754.101.585	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.358.026.772	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	637.490.766	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Persentase komposisi perempuan di sektor bisnis			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	606.269.135	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penduduk dan Keluarga Berencana		
				Persentase PD yang melaksanakan PPRG			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	87.640.770	
				Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	518.628.365	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase perempuan pengambil keputusan publik			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	865.338.181	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	236.201.674	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				Persentase kelembagaan pemenuhan hak anak			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	48.689.151	
				Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26.699.809	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
				Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	440.142.415	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
				Rata-rata usia kawin pertama wanita			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	215.155.574	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
				Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.644.550.166	
				Persentase peserta KB aktif			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.077.306.805	
				Persentase peserta KB Aktif			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	567.243.361	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Keluarga Berencana		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
				Persentase anggota Kelompok Tribina & UPPKS yang ber-KB			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	789.016.524	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)			
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.737.224.201	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.433.072.501	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif			
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	806.829.865	
				Persentase Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda			
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	806.829.865	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
				Cakupan Fasilitas Olahraga sesuai standart			
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.529.999.610	
				Cakupan Fasilitas Olahraga Sesuai Standart			
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5.520.760.453	
				Cakupan Pelatih yang tersertifikasi			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.529.999.610	
				Cakupan Pelatih yang Tersertifikasi			
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	337.519.730	
				Cakupan Pelatih yang Tersetifikasi			
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5.183.240.723	
				Cakupan Pembinaan Atlit Muda			
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	7.050.760.063	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
				Persentase Kelompok Pramuka Aktif			
					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	178.585.295	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.470.903.876	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.654.979.118	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	826.635.812	
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	826.635.812	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					Kecamatan Sananwetan	33.216.637	
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi						
		Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan kualitas lingkungan hidup					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	323.569.998	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.299.206.464	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.579.726.984	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	307.528.900	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.267.604.118	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
				Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.631.822.300	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
				Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.872.126.318	
				Persentase gedung pemerintahan yang dibangun			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.872.126.318	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Persentase jalan dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.440.857.989	
				Persentase jembatan dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.440.857.989	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	581.908.929	
				Persentase Pekerjaan Konstruksi yang Sesuai Standar			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	150.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Persentase ketersediaan dokumen tata ruang			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.351.444.736	
				Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	129.467.846	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks kepuasan masyarakat (IKM)			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50.275.080	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.759.760.825	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.120.814.020	
				Persentase tingkat hunian Rusunawa			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.120.814.020	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.936.434.109	
				Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.936.434.109	
				Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.936.434.109	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
				Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)			
					Dinas Perumahan Rakyat dan	2.393.950.012	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kawasan Permukiman		
				Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.393.950.012	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
				Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.397.189.231	
				Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.397.189.231	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.902.706.056	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Jumlah kelurahan tangguh bencana kategori Madya			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	195.089.658	
				Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	934.044.906	
				Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	554.596.488	
				Persentase kecepatan respon kurang dari 24 Jam untuk setiap status darurat bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	574.538.076	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	359.506.830	
				Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.237.682.213	
				Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.129.134.564	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				Persentase kejadian kebakaran yang tertangani			
					Satuan Polisi Pamong Praja	716.562.401	
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
				Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.750.000	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
				Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	329.149.400	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Lingkungan Hidup	7.426.244.761	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia			
					Dinas Lingkungan Hidup	405.141.904	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)			
					Dinas Lingkungan Hidup	824.210.967	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu			
					Dinas Lingkungan Hidup	824.210.967	
				Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu			
					Dinas Lingkungan Hidup	824.210.967	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
				Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota			
					Dinas Lingkungan Hidup	2.471.388.917	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
				Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan			
					Dinas Lingkungan Hidup	13.968.612	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup			
					Dinas Lingkungan Hidup	192.214.694	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina			
					Dinas Lingkungan Hidup	404.964.499	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)			
					Dinas Lingkungan Hidup	383.545.190	
				Persentase kelurahan berseri			
					Dinas Lingkungan Hidup	383.545.190	
				Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)			
					Dinas Lingkungan Hidup	383.545.190	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti			
					Dinas Lingkungan Hidup	16.540.856	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				Persentase sampah tertangani			
					Dinas Lingkungan Hidup	11.345.602.260	
				Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R			
					Dinas Lingkungan Hidup	11.345.602.260	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase kelurahan tertib administrasi			
					Sekretariat Daerah	132.518.619	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Perhubungan	7.051.543.686	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				IKM layanan angkutan sekolah gratis			
					Dinas Perhubungan	9.166.921.952	
				IKM terhadap layanan parkir tepi jalan umum			
					Dinas Perhubungan	1.289.487.403	
				IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor			
					Dinas Perhubungan	7.824.145.632	
				IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum			
					Dinas Perhubungan	7.586.367.215	
				Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik			
					Dinas Perhubungan	7.586.367.215	
				Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas			
					Dinas Perhubungan	9.778.280.992	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik			
					Dinas Perhubungan	7.881.034.126	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik			
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.001.134.618	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar)			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	37.658.413	
				Persentase pengawasan peredaran obat hewan			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	65.854.301	
				Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	119.390.523	
				Persentase sarana pertanian yang tersedia			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	65.854.301	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	887.353.475	
				Persentase produk RPH yang dijamin ASUH			
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	37.352.056	
				Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	850.001.419	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	11.961.000	
				Jumlah Dokumen IKM yang tersusun			
					Kecamatan Kepanjenkidul	52.716.218	
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					Kecamatan Sananwetan	44.145.208	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Persentase layanan kecamatan tepat waktu			
					Kecamatan Kepanjenkidul	49.614.475	
				Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu			
					Kecamatan Kepanjenkidul	49.614.475	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti			
					Kecamatan Kepanjenkidul	715.774.761	
				Persentase RT berdaya			
					Kecamatan Kepanjenkidul	110.018.936	
				Persentase RT Berdaya			
					Kecamatan Kepanjenkidul	605.755.825	
6	Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis						
		Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis dan meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan anak					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Satuan Polisi Pamong Praja	5.728.923.157	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan			
					Satuan Polisi Pamong Praja	4.651.611.063	
				Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Satuan Polisi Pamong Praja	5.365.732.408	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
				Persentase budaya lokal yang dikembangkan			
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	459.239.455	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
				Persentase kesejarahan yang dikembangkan			
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	653.535.600	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
				Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan			
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	260.502.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Jumlah Dokumen IKM yang tersusun			
					Kecamatan Kepanjenkidul	17.780.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Kepanjenkidul	120.377.679	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.781.672.529	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
				Persentase Kampung Berkarakter Pancasila			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	169.976.784	
				Persentase penyelesaian konflik keagamaan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	169.976.784	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Persentase Partai Politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.242.706.865	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.883.107	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	281.569.384	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.718.094.166	

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan tahun 2023 disajikan pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indek Kepuasan Masyarakat (IKM) indeks kepuasan masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,79 indek baik indeks 81,79 indeks 81,79 % 81,79 indeks 81,79 Indeks 81,79 INDEKS 81,79 indels	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 % 100 % 100 persen 100 Persen 100 % 100 %	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (lppd,pk,Pk perubahan) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen 2 laporan 2 Laporan 3 Laporan 9 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3500 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 % 100 persen 100 % 100 persen 100 %	1.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket 100 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kota Blitar	
							1.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8 buah 54 Orang 57 Orang 60 Orang 63 Orang 65 Orang 70 Orang 100 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar Persentase Ketersediaan Administrasi umum Perangkat Daerah sesuai standart Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 % 100 % 100 persen 100 % 100 persen	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket 2 Paket 3 Paket 10 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket 4 Paket 5 Paket 17 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket 2 Paket 3 Paket 12 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket 4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen 12 Dokumen 36 Dokumen 48 Dokumen 64 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan mesin lainnya yang tersedia Jumlah paket peralatan mesin lainnya yang tersedia Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhanPersentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	12 unit 100 % 100 % 100 % 100 persen 100 %	1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket 2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket 2 Unit 3 Unit 6 Unit 12 Unit 13 Unit 15 unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Blitar	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar Persentase penyediaan Jasa Penunjang urusan sesuai standar Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Sesuai Standar persentase penyediaan jasa penunjang uusan sesuai standart Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 % 100 % 100 persen 100 persen 100 % 100 % 100 %	1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan 1 Laporan 2 Laporan 45 Laporan	Kota Blitar	
							1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk telepon,listrik dan internet)	3 Laporan 24 Laporan 36 laporan 36 Laporan 36 laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD yang terpelihara sesuai standar Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar persentase BMD yang terpelihara sesuai standart Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 % 100 % 100 persen 100 % 100 % 100 %	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Blitar	
							1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit 2 Unit 21 Unit 1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 14 Unit 19 Unit 31 Unit 42 Unit 84 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 paket 3 Unit	Kota Blitar	
							1.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit 3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertuntaskan sesuai hasil assesment Persentase angka kelulusan SD/MI Persentase angka kelulusan SMP/MTs Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI) Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B Persentase Satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti Korupsi	100 % 100 % 84.6 % 95.85 % 100 % 33.46 % 100 %	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah dasar	98.87 %	1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	Kota Blitar	
							1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Kota Blitar	
							1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	Kota Blitar	
							1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	Kota Blitar	
							1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	0 Unit 7 Unit	Kota Blitar	
							1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	Kota Blitar	
							1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	63 Satuan Pendidikan	Kota Blitar	
							1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	63 Satuan Pendidikan	Kota Blitar	
							1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	Kota Blitar	
							1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	49 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	48 Satuan Pendidikan	Kota Blitar	
							1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200 Orang	Kota Blitar	
							1.01.02.2.01.33 Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	Kota Blitar	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah dasar	98.87 persen	1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	Kota Blitar	
					Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah dasar	100 %					
					Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah menengah pertama	98.87 %					
					Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah pendidikan menengah	98.05 %					
					Persentase Cakupan Pelayanan Pendidikan Dasar	98.87 %					
					persentase cakupan pelayanan pendidikan sekolah dasar	98.87 %					
					persentase cakupan pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama	98 %					
					Persentase cakupan pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama	98.04 persen					
					Persentase cakupan pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama	98.87 %					
					Presentase Cakupan Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	98.87 %					
							1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	Kota Blitar	
							1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Kota Blitar	
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit		
							1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kota Blitar	
							1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 paket	Kota Blitar	
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		
							1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 paket	Kota Blitar	
								Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket		
								Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 PAKET		
								Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket		
							1.01.02.2.02.26 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0 Paket	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket 2 Paket 3 Paket 5 Paket 12 Paket	Kota Blitar	
							1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan peserta didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	22 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Unit 7 Paket 13 Paket 21 Paket	Kota Blitar	
							1.01.02.2.02.29 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit 2 paket 2 Unit 3 Unit 7 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.02.30 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 JENIS 4 Unit 5 Unit 7 Unit 100 Unit 230 Unit 280 unit 320 Unit 403 Unit	Kota Blitar	
							1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	Kota Blitar	
							1.01.02.2.02.33 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	6 Buku 8 Buku	Kota Blitar	
							1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket 2 Paket 4 Paket	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian	260 Peserta Didik 280 Peserta Didik 300 Peserta Didik 420 Peserta Didik 425 Peserta Didik 720 Peserta Didik 805 Peserta Didik 864 Peserta didik 2870 Peserta Didik 1 Pendidikan	Kota Blitar	
							1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	20 Satuan Pendidikan	Kota Blitar	
							1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	Kota Blitar	
							1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	20 Satuan Pendidikan	Kota Blitar	
							1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	9 Satuan Pendidikan	Kota Blitar	
							1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah pendidikan anak usia dini	83.85 %	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	Kota Blitar	
							1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	Kota Blitar	
							1.01.02.2.03.06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	Kota Blitar	
							1.01.02.2.03.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	2 Paket	Kota Blitar	
							1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	Kota Blitar	
							1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	7 Paket	Kota Blitar	
							1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4666 Peserta Didik	Kota Blitar	
							1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	500 Peserta Didik	Kota Blitar	
							1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	172 Satuan Pendidikan	Kota Blitar	
							1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	172 Satuan Pendidikan	Kota Blitar	
							1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	17 Satuan Pendidikan	Kota Blitar	
							1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	172 Orang	Kota Blitar	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Capaian cakupan pelayanan PNF/ Kesetaraan sesuai SPM Teknis Pendidikan	80.07 %	1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kota Blitar	
							1.01.02.2.04.05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Kota Blitar	
							1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	Kota Blitar	
							1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	3 Paket	Kota Blitar	
							1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	280 Peserta Didik	Kota Blitar	
							1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	5 Satuan Pendidikan	Kota Blitar	
							1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	Kota Blitar	
							1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan	Kota Blitar	
							1.01.02.2.04.18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 Orang	Kota Blitar	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi	100 % 30 %	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Yang Ditetapkan	1 muatan lokal	1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Blitar	
							1.01.03.2.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Blitar	
							1.01.03.2.01.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	2000 Buku	Kota Blitar	
							1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	100 Orang	Kota Blitar	
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Yang Ditetapkan	1 muatan lokal	1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Blitar	
							1.01.03.2.02.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	750 Buku	Kota Blitar	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi amat baik 31,50 % Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan 88.88 %		1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah jenis jenjang pendidik dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi pemerataan kuantitas dan peningkatan kualitas 3 jenjang Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV 92.74 % Rasio pengawas dan penilik PAUD 5.39 % Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional 1.95 nilai Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional 1.85 nilai Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 2.26 nilai Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 2.14		1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6 Dokumen	Kota Blitar	
							1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan	Kota Blitar	
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku 76.8 %		1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah rekomendasi penerbitan ijin PAUD dan PNF yang terbit 1 jenis		1.01.05.2.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	Kota Blitar	
							1.01.05.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	Kota Blitar	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,9 Indeks		1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar 100 %		1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	246 Orang/bulan 492 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kota Blitar	
							1.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	80 %	1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	80 %	1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Blitar	
					Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	100 %					
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	85 %					
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	80 %					
					Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	100 %					
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %					
					Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %					
					Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %					
					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %					
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %					
					Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	85 %					
					Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	80 %					
					Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100 %					
					Persentase SDM Rumah Sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	55 %					
					Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	80 %					
					Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	80 %					
					Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	80 %					
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100 persen	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	80 %	1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	Kota Blitar	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen		Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	100 %					
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100 persen					
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persen		Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100 %					
		Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100 persen		Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100 persen					
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100 persen		Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	100 persen					
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	100 persen		Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	100 persen					
		Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	95,2 persen								
		Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	95.2 persen								
		Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	63 persen								
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100 persen								
		Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 persen								
		Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang	100 persen								

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)									
		Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM) "	100 persen								
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100 persen								
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100 persen								
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM) "	100 persen								
		Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100 persen								
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen								
		Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,25 %								
		Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen								
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen								
		Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100 persen								
		Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	26 persen								
		Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100 persen								
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100 persen								
							1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah jenis alat kesehatan di Puskesmas yang tersedi	0 Unit 7 Unit 8 Unit 37 Unit 190 Unit 3 jenis	Kota Blitar	
							1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat di Puskesmas yang tersedia Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 jenis 0 Paket 1 Paket 3 Paket	Kota Blitar	
							1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Jumlah BMHP di Puskesmas yang tersedia	0 Paket 1 Paket 6 Paket 7 Paket 2 jenis	Kota Blitar	
							1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	39 Unit	Kota Blitar	
							1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Paket	Kota Blitar	
				1.02.02.2.02			1.02.02.2.02.01 Pengelolaan			Kota	

No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	Program			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sub Kegiatan		Blitar	
						100 persen		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang		
					Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100 persen					
					Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100 %					
					Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100 persen		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	758 Orang		
					Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100 %					
					Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	2 fasilitasi					
					Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	3 fasilitasi		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	835 Orang		
					Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	100 persen					
					Jumlah Pos UKK yang terbina	9 Pos UKK					
					Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 jumlah tatanan		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2235 Orang		
					Persentae program prioritas yang dipromosikan	100 %					
					Persentae program prioritas yang dipromosikan	100 persen					
					Persentase bayi, balita, ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100 persen					
					Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100 %					
					Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	90.3 %					
					Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standa	100 persen					
					Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai standar	100 %					
					Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100 %					
					Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100 persen					
					Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	13 %					
					Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	45 %					
					Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	52.38 %					
					Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	52.38 persen					
					Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	67 persen					
					Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14.3 %					
					Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14.3 persen					
					Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	100 persen					
					Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100 %					
					Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100 persen					
					Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100 %					
					Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100 persen					
					Persentase penyehat tradisional yang berizin	4 %					
					Persentase program prioritas yang dipromosikan	100 %					
					Persentase program prioritas yang dipromosikan	100 persen					
					Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	67 %					
					Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	67 persen					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100 %					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100 persen					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100 %					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100 persen					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100 %					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100 persen					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100 %					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100 persen					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100 %					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100 persen					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100 %					

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100 persen					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100 %					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100 persen					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100 %					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100 persen					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan orangdengan risiko HIV yang terlaksana	100 persen					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100 %					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100 persen					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100 %					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100 persen					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100 %					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100 persen					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100 %					
					Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100 persen					
					Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100 %					
					Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	78.3 %					
							1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	Kota Blitar	
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	797 Orang		
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2134 Orang		
							1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	Kota Blitar	
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	756 Orang		
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2032 Orang		
							1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2999 Orang	Kota Blitar	
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3071 Orang		
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3578 Orang		
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8252 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6010 Orang	Kota Blitar	
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6552 Orang		
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6915 Orang		
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17600 Orang		
							1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28692 Orang	Kota Blitar	
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34208 Orang		
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34505 Orang		
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92692 Orang		
							1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6538 Orang	Kota Blitar	
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7789 Orang		
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8499 Orang		
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22826 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang 15779 Orang 17183 Orang 47016 Orang	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang 1428 Orang 1562 Orang 4274 Orang	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang 126 Orang 128 Orang 379 Orang	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang 480 Orang 700 Orang 1268 Orang	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang 1153 Orang 1210 Orang 1552 Orang	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen 12 Dokumen	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen 5 Dokumen 12 Dokumen	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen 12 Dokumen	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen 12 Dokumen	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen 3 Dokumen 12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3 Dokumen	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen 7 Dokumen 12 Dokumen	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3 Dokumen	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24 Dokumen	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1540 Paket	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	8 Dokumen	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Kota Blitar	
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Dokumen		
							1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Dokumen	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	Kota Blitar	
							1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	50 Keluarga 8056 Keluarga	Kota Blitar	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100 %	1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	Kota Blitar	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin yang dibina	100 %	1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen	Kota Blitar	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100 %	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan izin praktik tenaga kesehatan	100 %	1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	270 Dokumen	Kota Blitar	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina	100 %	1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	Kota Blitar	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	14 %	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	20 Orang	Kota Blitar	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	100 % 85 %	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang dibina	100 %	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dibina	100 %	1.02.04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	Kota Blitar	
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang berizin	92 %	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2 Dokumen	Kota Blitar	
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase IRTP (Indutri Rumah Tangga Pangan) yang dibina dan tersertifikasi	92 %	1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40 Unit	Kota Blitar	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	61.9 %	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang dibina Persentase Posyandu Strata Purnama Mandiri Persentase rumah tangga sehat Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) ber-PHBS	3 kelompok UKBM 94.61 % 53 % 54 %	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	8 Dokumen	Kota Blitar	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 Kelompok UKBM	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	Kota Blitar	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.7 Nilai 82.7 Nilai	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	104 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	39 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.03.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	97 %	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Peningkatan dan Pemeliharaan	10.39 %	1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	Kota Blitar	
							1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.532 KM	Kota Blitar	
							1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1.743 KM	Kota Blitar	
							1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3.485 KM	Kota Blitar	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam kondisi baik	88.9 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang terbangun	68.42 %	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	Kota Blitar	
							1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	15 Liter/Detik	Kota Blitar	
							1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	15 Liter/Detik	Kota Blitar	
							1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	2 Unit	Kota Blitar	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	83 %	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD yang terbangun	68.42 %	1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kota Blitar	
							1.03.05.2.01.05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	10 Rumah Tangga	Kota Blitar	
							1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	25 Rumah Tangga	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	10 Kelompok	Kota Blitar	
							1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	2 Unit	Kota Blitar	
							1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	50 Rumah Tangga	Kota Blitar	
							1.03.05.2.01.14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	36 Rumah Tangga	Kota Blitar	
							1.03.05.2.01.16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	20 M^3/Hari	Kota Blitar	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik 98.5 %		1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	1.35 %	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen	Kota Blitar	
							1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	1500 Meter	Kota Blitar	
							1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	250 Meter	Kota Blitar	
							1.03.06.2.01.08 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota	
							1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	400 Meter	Kota Blitar	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun 86.96 % Persentase gedung pemerintahan yang dibangun 87,5 %		1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung	100 %	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	5 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Blitar	
							1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	Kota Blitar	
							1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	1 Unit	Kota Blitar	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik 99.4 % Persentase jembatan dalam kondisi baik 99.7 %		1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi Persentase jembatan yang dibangun Persentase jembatan yang dipelihara	5.09 % 50 % 6.12 %	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	3 Dokumen	Kota Blitar	
							1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	Kota Blitar	
							1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	2 KM	Kota Blitar	
							1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1 KM	Kota Blitar	
							1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	20 M	Kota Blitar	
							1.03.10.2.01.17 Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	4 M	Kota Blitar	
							1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	3 M	Kota Blitar	
							1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	400 M	Kota Blitar	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar 100 %		1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	77.02 %	1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	100 Orang	Kota Blitar	
							1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	250 Orang	Kota Blitar	
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	40 %	1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.11.2.02.02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	2 Dokumen	Kota Blitar	
							1.03.11.2.02.08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	3 Dokumen	Kota Blitar	
							1.03.11.2.02.09 Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	4 Dokumen	Kota Blitar	
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan jasa konstruksi	100 %	1.03.11.2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	2 Dokumen	Kota Blitar	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	81.58 %	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW kota	100 %	1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Blitar	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	100 %	1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Blitar	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tata Ruang	100 %	1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	12 Dokumen	Kota Blitar	
							1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	Kota Blitar	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti	7.69 %	1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen	Kota Blitar	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	80.57 Indeks	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.04.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.04.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.04.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	1.04.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Blitar	
							1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.04.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.04.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Blitar	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.04.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.04.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah 100 % Persentase tingkat hunian Rusunawa 95 %		1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase data perumahan yang tersusun dan terupdate	75 %	1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Blitar	
							1.04.02.2.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	Kota Blitar	
							1.04.02.2.01.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	Kota Blitar	
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	100 %	1.04.02.2.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	Kota Blitar	
							1.04.02.2.02.04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	0 Orang	Kota Blitar	
							1.04.02.2.02.06 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	0 Dokumen	Kota Blitar	
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan jenis layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	100 %	1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	Kota Blitar	
							1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit Rumah	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	IKM Pengelolaan Rusunawa	80.57 Indeks	1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	0 Laporan	Kota Blitar	
							1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	Kota Blitar	
							1.04.02.2.05.03 Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	0 Unit	Kota Blitar	
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang difasilitasi	0 perumahan	1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0 Laporan	Kota Blitar	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman 66,27 % Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman 67.52 % Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh 12.65 %		1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan data base permukiman yang tersusun	1 Dokumen	1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Kota Blitar	
							1.04.03.2.02.03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	2 Laporan	Kota Blitar	
							1.04.03.2.02.04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	2 Laporan	Kota Blitar	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni dikawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	192 unit 67.664 m 125.663 m	1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	95 Unit Rumah	Kota Blitar	
							1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	Kota Blitar	
							1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	4.8 Ha	Kota Blitar	
							1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.04.03.2.03.08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	0 Unit		
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	1.03 % 20.11 %	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/rumah tangga berpenghasilan rendah yang telah difasilitasi pembangunan rumah Jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	8 unit 180 unit	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	107 Unit Rumah	Kota Blitar	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	64 % 64 %	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	256.3 m 2000.74 m	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4 Lokasi	Kota Blitar	
							1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	Kota Blitar	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80 indeks Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81.50 indeks		1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen 12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan 20 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan 45 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan 5 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket 6 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang 45 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket 5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket 5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket 12 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket 12 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen 24 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan 50 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan 100 %		1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Blitar	
							1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit 22 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.05.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Blitar	
							1.05.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Kota Blitar	
							1.05.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Blitar	
							1.05.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Blitar	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar 100 % Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar 100 %		1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan 36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan 24 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit 38 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.05.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit 20 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit 37 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 2 Unit	Kota Blitar	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan 95,64 % Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan 95,06 %		1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	20 % 100 %	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2017 Kasus	Kota Blitar	
							1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1929 Kasus	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kota Blitar	
							1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Kota Blitar	
							1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 Orang	Kota Blitar	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 Laporan	Kota Blitar	
							1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	Kota Blitar	
							1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	Kota Blitar	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	2 kelurahan 100 % 50 % 92 %	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	950 Orang	Kota Blitar	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kompetensi SDM penanganan bencana yang terlatih	100 %	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	90 Orang	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kota Blitar	
							1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	21 Kawasan	Kota Blitar	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	Kota Blitar	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun	100 %	1.05.03.2.04.03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	Kota Blitar	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100 %	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	Kota Blitar	
							1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kota Blitar	
							1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	Kota Blitar	
							1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	Kota Blitar	
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100 %	1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	Kota Blitar	
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	20 %	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	140 Orang	Kota Blitar	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82.4 Indeks Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 82.4 Indeks		1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.06.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	1.06.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.06.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 jenis	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							1.06.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100 %	1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	Semua Kab/Kota	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Peningkatan PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	0.89 %	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	122 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	Semua Kab/Kota	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	270 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Peningkatan PMKS terlatih Persentase penurunan Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	24.2 % 1.38 %	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval Persentase PMKS terlatih Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100 % 20 % 100 %	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Keluarga	Semua Kab/Kota	
							1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10764 Keluarga	Semua Kab/Kota	
							1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Semua Kab/Kota	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	100 %	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100 %	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Orang	Semua Kab/Kota	
							1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	Semua Kab/Kota	
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	84 %	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	Semua Kab/Kota	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP dalam kondisi baik	100 %	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	100 %	1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	Semua Kab/Kota	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	47 %	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	83 %	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	175 Orang	Kota Blitar	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online Persentase pencari kerja yang ditempatkan	14 % 79 %	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja terdaftar	200 Pencaker	2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	150 Orang	Kota Blitar	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja	32.7 %	2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0 Orang	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30 Orang	Kota Blitar	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	100 %	2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	75 Perusahaan	2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkara	Kota Blitar	
							2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	0 Perkara	Kota Blitar	
							2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Kota Blitar	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Nilai	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 7 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar	100 Persen	2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 Persen	2.08.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	99 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.08.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum PD sesuai standar	100 Persen	2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.08.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.08.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 Persen	2.08.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 Persen	2.08.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persen	2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.08.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase komposisi perempuan di sektor bisnis 33 Persen Persentase PD yang melaksanakan PPRG 100 Persen Persentase perempuan pengambil keputusan publik 46 Persen		2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender	32 Persen	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kota Blitar	
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi dalam bidang politik hukum sosial dan ekonomi	20.53 Persen	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	Kota Blitar	
							2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Organisasi	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang terfasilitasi	3 Organisasi	2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	21 Lembaga	Kota Blitar	
							2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	614 Orang	Kota Blitar	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100 Persen	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100 Persen	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Blitar	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100 Persen	2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	1 Orang	Kota Blitar	
							2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Layanan	Kota Blitar	
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100 Persen	2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	110 Orang	Kota Blitar	
							2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak	100 Persen	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan	100 Persen	2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Blitar	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	100 Persen	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Anak	Kota Blitar	
							2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Blitar	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100 Persen	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	100 Persen	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kota Blitar	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	100 Persen	2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Layanan	Kota Blitar	
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	100 Persen	2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Blitar	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Indeks	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.09.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	2.09.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.09.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	98 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.09.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.09.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Blitar	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka ketersediaan energi perkapita/hari	2200 kkal/kapita /hari	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan masyarakat	100 %	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	3 Laporan	Kota Blitar	
		Angka konsumsi energi per kapita	2010 kkal/kapita /hari								
							2.09.03.2.01.07 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	45 Keluarga	Kota Blitar	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi protein (gr/kapita/ tahun)	57 gr/kapita/hari	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	Kota Blitar	
							2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	13.83 %	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan	2 kali	2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	Kota Blitar	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar (%)	100 %	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji	67 %	2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Blitar	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	100 %	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti	100 %	2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Kota Blitar	
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	97 %	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen pertanahan yang tersusun sesuai regulasi	100 %	2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Blitar	
							2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Blitar	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 Indeks	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 persen	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 persen	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 persen	2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.11.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 persen	2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 persen	2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	100 persen	2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 persen	2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.11.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	69 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	101 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.11.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	425 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100 persen	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	1 dokumen	2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup yang tersusun	2 dokumen	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	Kota Blitar	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq) Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	7 persen 55 persen 100 persen	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	3 aksi 3 kali 18 titik	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	Kota Blitar	
							2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	16,27 persen	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik yang terkelola	420.34 Ha	2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	13 Unit	Kota Blitar	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100 persen	2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	40 usaha kegiatan	2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	64 persen	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	60 usaha	2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan	Kota Blitar	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100 persen	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	21 kelompok	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	14 Lembaga	Kota Blitar	
							2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	Kota Blitar	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura) Persentase kelurahan berseri Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	1 kali 47,62 persen 24,03 persen	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	56 predikat 16 predikat	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	2 kasus aduan	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	1 Dokumen	Kota Blitar	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	83,10 persen 11,89 persen	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Volume sampah tertangani Volume sampah yang terkurangi	22666.52 ton 3386.95 ton	2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	26053.47 Ton	Kota Blitar	
							2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	Kota Blitar	
							2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11 Unit	Kota Blitar	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	86 indeks	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart	100 %	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.12.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	2.12.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Blitar	
							2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit 1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.12.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Blitar	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.12.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.12.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Blitar	
							2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.12.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	2.55 % 0.03 % 0.03 %	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KIA) Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KK) Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP)	87.35 % 100 % 99.62 %	2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	Kota Blitar	
							2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	32300 Dokumen	Kota Blitar	
				2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendafataran penduduk	100 %	2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	Kota Blitar	
				2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100 %	2.12.02.2.04.02 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	1 Laporan	Kota Blitar	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen akta kematian Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	100 % 0.03 % 2.60 % 2.19 %	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akte kalhiran) Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akte kematian) Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil (akta perceraian)	98.01 % 100 % 83.43 %	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5400 Dokumen	Kota Blitar	
							2.12.03.2.01.05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	Kota Blitar	
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	100 %	2.12.03.2.02.01 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Laporan		
							2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		
							2.12.03.2.02.06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.12.03.2.02.08 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	Kota Blitar	
				2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	100 %	2.12.03.2.03.04 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Kota Blitar	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	16 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan	100 %	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	Kota Blitar	
							2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen	Kota Blitar	
				2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	100 %	2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	Kota Blitar	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update	100 %	2.12.04.2.03.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Kota Blitar	
							2.12.04.2.03.05 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Kota Blitar	
				2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100 %	2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Kota Blitar	
							2.12.04.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	Kota Blitar	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	100 %	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependudukan	100 %	2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	Kota Blitar	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	57.14 %	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	18 kelurahan	2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 Dokumen	Kota Blitar	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita	23,01 Tahun	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	23.01 Tahun	2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Blitar	
							2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	3 Satuan Pendidikan	Kota Blitar	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase profil kependudukan yang tersedia	100 Persen	2.14.02.2.02.03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	Kota Blitar	
							2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	6 Dokumen	Kota Blitar	
							2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	Kota Blitar	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) Persentase peserta KB aktif	8,98 Indeks 74,35 Persen	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Cakupan Pelaksanaan Advokasi KIE	3 Kecamatan	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	Kota Blitar	
							2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	Kota Blitar	
							2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	6 Laporan	Kota Blitar	
							2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	Kota Blitar	
							2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3 Laporan	Kota Blitar	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	100 Persen	2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	359 Orang	Kota Blitar	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	50.35 Persen	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25 Laporan	Kota Blitar	
							2.14.03.2.03.02 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Orang	Kota Blitar	
							2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12 Orang	Kota Blitar	
							2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	13 Unit	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.14.03.2.03.07 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	150 Orang	Kota Blitar	
							2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 Laporan	Kota Blitar	
							2.14.03.2.03.09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	12 Orang	Kota Blitar	
							2.14.03.2.03.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	150 Orang	Kota Blitar	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi pelayanan dan pembinaan kesertaan KB	100 Persen	2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	6 Kampung	Kota Blitar	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota Kelompok Tribina & UPPKS yang ber-KB	74.35 Persen	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	100 Persen	2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Laporan	Kota Blitar	
							2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Kelompok	Kota Blitar	
							2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	Kota Blitar	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.96 Indeks	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.15.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.15.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.15.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai standar	100 %	2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Blitar	
							2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	161 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.15.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	IKM layanan angkutan sekolah gratis IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	83.15 indeks 81.75 indeks 82.1 indeks 99.50 % 0.32 % 87 %	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	5 Jenis	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	30 Unit	Kota Blitar	
							2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	23 Unit	Kota Blitar	
							2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5994 Unit	Kota Blitar	
							2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit	Kota Blitar	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang terkelola	12 Jenis	2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	Kota Blitar	
							2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	Kota Blitar	
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP Juru pakir	77 %	2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kota Blitar	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	95 %	2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	5100 Unit	Kota Blitar	
							2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 dokumen	Kota Blitar	
							2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	Kota Blitar	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	2 kajian	2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5 Unit	Kota Blitar	
							2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Blitar	
							2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kota Blitar	
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	84 %	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	9 Unit	Kota Blitar	
							2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kota Blitar	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.5 Indeks	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 Persen	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Blitar	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	2.16.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.16.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	100 persen	2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 persen	2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase diseminasi dan layanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang ditetapkan Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	85 % 70 %	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	45.5 persen	2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	1 Dokumen	Kota Blitar	
							2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 dokumen	Kota Blitar	
							2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	12 Dokumen	Kota Blitar	
							2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	510 Dokumen	Kota Blitar	
							2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	11 Dokumen	Kota Blitar	
							2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	Kota Blitar	
							2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan hubungan media	1000 Layanan	Kota Blitar	
							2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media, dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program dan Kebijakan	15 Dokumen	Kota Blitar	
							2.16.02.2.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan manajemen komunikasi krisis	1 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	MJumlah Sumber Daya Komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	30 Orang	Kota Blitar	
							2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen kemitraan dengabn masyarakat media dan komunitas dalam mendiskriminasikan informasi program / kebijakan	80 Dokumen	Kota Blitar	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	90 persen	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penerapan domain go.id / sub domaian pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	100 persen	2.16.03.2.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Domain	Kota Blitar	
							2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Blitar	
							2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3 Unit	Kota Blitar	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layananan publik	93 persen	2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Kota Blitar	
							2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Kota Blitar	
							2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Blitar	
							2.16.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.03.2.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1 Perangkat Daerah	Kota Blitar	
							2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	Kota Blitar	
							2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	Kota Blitar	
							2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	Kota Blitar	
							2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Blitar	
							2.16.03.2.02.11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	Kota Blitar	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.5 Indeks	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.17.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.17.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100 %	2.17.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Blitar	
							2.17.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.17.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Blitar	
							2.17.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Blitar	
							2.17.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Blitar	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	100 %	2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.17.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	23 %	2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	3 unit usaha	2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi0	34 %	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	29 %	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha	Kota Blitar	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	30 %	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan KSP/USP	100 %	2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100 Unit Usaha	Kota Blitar	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	36.4 %	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	72 %	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	Kota Blitar	
				2.17.05.2.02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yag memahami pengetahuan UKM	100 orang	2.17.05.2.02.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM yg difasilitasi peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta kapasitas dan kompetensi	160 orang	Kota Blitar	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mengalami peningkatan volume usaha	34 %	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang kenggotananya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	12 %	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	Kota Blitar	
							2.17.06.2.01.02 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha	2.3 % 1.85 %	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase produk unggulan UM yang dipromosikan Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan	0.5 % 100 %	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12000 Unit Usaha	Kota Blitar	
							2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 Unit Usaha	Kota Blitar	
							2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	25 Orang	Kota Blitar	
							2.17.07.2.01.06 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	70 Orang	Kota Blitar	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	1.7 %	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Kelurahan yang memiliki WUB minimal 2	100 %	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	Kota Blitar	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.2 Indeks	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 persen	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 persen	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 persen	2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.18.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	210 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 persen	2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 persen	2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.18.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Blitar	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 persen	2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 persen	2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.18.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	50 persen	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitasi/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	1 dokumen	2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 Kegiatan Usaha	Kota Blitar	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	45 persen	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	100 %	2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Blitar	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	99,5 persen	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	3 persen	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1060 Pelaku Usaha	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	3860 Kegiatan Usaha	Kota Blitar	
							2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4 Orang	Kota Blitar	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	"Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	75 persen	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	100 perusahaan	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	6 Kegiatan Usaha.	Kota Blitar	
							2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 Pelaku Usaha	Semua Kab/Kota	
							2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	6 Kegiatan Usaha	Semua Kab/Kota	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Indeks	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standart	100 %	2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart	100 %	2.19.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.19.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standart	100 %	2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.19.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	2.19.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai standart	100 %	2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	63 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif Persentase Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda	80 % 6 %	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada Kegiatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	520 orang 80 %	2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	70 Orang	Kota Blitar	
							2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	140 Orang	Kota Blitar	
							2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	Kota Blitar	
							2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	1140 Orang	Kota Blitar	
							2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	80 Orang	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada Kegiatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	80 %	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	Kota Blitar	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Fasilitas Olahraga sesuai standart Cakupan Pelatih yang tersertifikasi Cakupan Pembinaan Atlit Muda	67 % 69 % 41 %	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabor yang difasilitasi tempat latihan pada tahun N	20 Cabor	2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 Obyek	Kota Blitar	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah pada Tahun N	4 Kejuaraan 4 Kejuaraan	2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Blitar	
							2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	25 Orang	Kota Blitar	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3 jenis	2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1 Pelatda	Kota Blitar	
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang dibina	100 %	2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Organisasi	Kota Blitar	
							2.19.03.2.04.04 Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	3 Organisasi	Kota Blitar	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Olahraga Rekreasi yang difasilitasi	33 %	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	Kota Blitar	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kelompok Pramuka Aktif	64 %	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Kelompok / Organisasi Pramuka yang dibina	64 %	2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	Kota Blitar	
							2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.04.2.01.07 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	Kota Blitar	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	95,07 persen	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	100 persen	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5 Dokumen	Kota Blitar	
							2.20.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	14 Orang	Kota Blitar	
							2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	8 Dokumen	Kota Blitar	
							2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	8 Orang	Kota Blitar	
							2.20.02.2.01.05 Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	Kota Blitar	
							2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik SEktoral yang Dihimpun	20 Dokumen	Kota Blitar	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase implementasi persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	46,51 persen	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintsh daerah kab/kota	46.51 persen	2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	8 Dokumen 0 Dokumen	Kota Blitar	
							2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	Kota Blitar	
							2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan Keamanan Informasi Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	20 Perangkat Daerah 0 Perangkat Daerah	Kota Blitar	
				2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	35 persen	2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	20 Perangkat Daerah	Kota Blitar	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	75 persen	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi	9 jenis	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	Kota Blitar	
							2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	48 Orang	Kota Blitar	
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi	9 event	2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	8 laporan	Kota Blitar	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	80 %	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi	7 event	2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	6 kelompok	Kota Blitar	
							2.22.04.2.01.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit	Kota Blitar	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan	60 %	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola	2 obyek	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 Objek	Kota Blitar	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,3 Indeks	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	7 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai standart	100 %	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.23.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart	100 %	2.23.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.23.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai standar	100 %	2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100 %	2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	167 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standart	100 %	2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.23.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							2.23.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan 81,5 Indeks Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 3.3 : 1 Rasio		2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0.3 %	2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.02.2.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Eksemplar	Kota Blitar	
							2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	98 Perpustakaan	Kota Blitar	
							2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98 Orang	Kota Blitar	
							2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	721 Eksemplar	Kota Blitar	
							2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kota Blitar	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemustaka	57 %	2.23.02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	122 Lokus	Kota Blitar	
							2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	20 Orang	Kota Blitar	
							2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	Kota Blitar	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	81 Indeks	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan	100 %	2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	4500 Berkas	Kota Blitar	
							2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Laporan	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	20 %	2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	150 Pengguna	Kota Blitar	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	2.92 % 15.07 %	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan	29.67 %	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	1 Kelompok	Kota Blitar	
							3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kelompok	Kota Blitar	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan	1.48 %	3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Blitar	
							3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	Kota Blitar	
							3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40 Orang	Kota Blitar	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume penjualan hasil olahan perikanan (juta rupiah)	34230 juta rupiah	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu	17.39 %	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha	Kota Blitar	
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun	18.4 kg/kapita/tahun	3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Ton	Kota Blitar	
							3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	40 Pelaku Usaha	Kota Blitar	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 %	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.26.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.26.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	3.26.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.26.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.26.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.26.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	3.26.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.26.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Blitar	
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 % 80 %	3.26.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	15 Unit 15 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	87 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan Persentase peningkatan sarana dan prasarana obyek pariwisata Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno Persentase Peningkatan Usaha Pariwisata	50 persen 25 persen 30 persen 20 persen	3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang di kelola	3 sarpras	3.26.02.2.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Kawasan	Kota Blitar	
							3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Unit	Kota Blitar	
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 lokasi	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	Kota Blitar	
							3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	10 Unit		
							3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	Kota Blitar	
				3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaku usaha yang terdaftar	1 dokumen	3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	Kota Blitar	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	0,06 %	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata yang dilakukan	10 promosi	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	Kota Blitar	
							3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	Kota Blitar	
							3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Kota Blitar	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	3,3 %	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekraf Yang Ikut Kegiatan	39 orang	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	80 Orang	Kota Blitar	
							3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	40 Orang	Kota Blitar	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pengawasan peredaran obat hewan Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak Persentase sarana pertanian yang tersedia	19.35 % 20.37 % 72 %	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	40 %	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	Kota Blitar	
							3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	Kota Blitar	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang dibina	20 %	3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	Kota Blitar	
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar	100 %	3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	2 Laporan	Kota Blitar	
							3.27.02.2.03.02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	Kota Blitar	
				3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan yang sudah teregister	55 %	3.27.02.2.04.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik Persentase produk RPH yang dijamin ASUH	51.39 % 100 %	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia	25 %	3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	Kota Blitar	
							3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	Kota Blitar	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Presentase prasarana pertanian yg tersedia	69.9 Persen	3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	Kota Blitar	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	100 % 44.44 % 40 %	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis	0 kasus	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2 Laporan	Kota Blitar	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia	63 %	3.27.04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	Kota Blitar	
							3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 Laporan	Kota Blitar	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk hewan yang dibina	36 %	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	Kota Blitar	
							3.27.04.2.04.04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	Kota Blitar	
				3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase KIE yang yang terlaksana	75 %	3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	2 Laporan	Kota Blitar	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	100 %	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT	13.33 %	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	33 % 33 %	3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis	15 %	3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	Kota Blitar	
				3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan	1 rekomendasi	3.27.06.2.02.02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	2 Laporan	Kota Blitar	
				3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	1 rekomendasi	3.27.06.2.03.02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan	Kota Blitar	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	25 % 25 % 0.93 %	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM	35 %	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	Kota Blitar	
							3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	21 Unit	Kota Blitar	
							3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	Kota Blitar	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM 84 indeks		3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.30.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	3.30.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.30.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.30.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.30.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.30.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.30.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.30.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	3.30.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai standar	100 %	3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	3.30.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit 4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.30.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.30.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							3.30.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Blitar	
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik Persentase usaha yang memperoleh pengembangan kapasitas	70,5 persen 5 persen	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase bangunan pasarrakyat dalam kondisi baik	70 %	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	8 Unit	Kota Blitar	
							3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit	Kota Blitar	
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	5 %	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	Kota Blitar	
							3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen	Kota Blitar	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yg dilaporkan dan dipublikasikan	100 persen	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase barang penting yang diawasi	100 %	3.30.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	jumlah laporan pengawasan distribusi perdagangan persentase pengendalian harga dan stok barang yg diawasi	12 laporan 100 %	3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	Kota Blitar	
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	100 %	3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 Laporan	Kota Blitar	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase alat UTTP bertanda tera sah	40 %	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	5700 unit	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5500 Unit	Kota Blitar	
							3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	300 Orang	Kota Blitar	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase peningkatan IKM	2,5 %	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	persentase IKM yang memperoleh pembinaan	5 %	3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	Kota Blitar	
							3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	Kota Blitar	
							3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	4 Dokumen	Kota Blitar	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH										
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	Baik (79-84) Nilai 100 % 27,59 % 65,52 %	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar	100 % 100 %	4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan 6 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 %	4.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Blitar	
							4.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Blitar	
				4.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100 %	4.01.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Blitar	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 %	4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	170 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Blitar	
							4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Kota Blitar	
							4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.01.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Blitar	
							4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kota Blitar	
							4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 Paket	Kota Blitar	
							4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	Kota Blitar	
							4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kota Blitar	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	100 %	4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	Kota Blitar	
							4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	Kota Blitar	
							4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	22 OPD	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	Kota Blitar	
							4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	Kota Blitar	
							4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	Kota Blitar	
							4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	Kota Blitar	
							4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Kota Blitar	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	100 %	4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 Laporan	Kota Blitar	
							4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 Laporan	Kota Blitar	
							4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3055 Laporan	Kota Blitar	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	83.33 % 100 %	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	100 % 100 % 100 % 83 %	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	Kota Blitar	
							4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	Kota Blitar	
							4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	Kota Blitar	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	6 Rumusan Kebijakan 4 Rumusan Kebijakan	4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	Kota Blitar	
							4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	Kota Blitar	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 Dokumen	Kota Blitar	
							4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	Kota Blitar	
							4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70 Dokumen	Kota Blitar	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83.33 %	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	8 Dokumen	Kota Blitar	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 %	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	6 Rumusan Kebijakan	4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	Kota Blitar	
							4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	Kota Blitar	
							4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	Kota Blitar	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 dokumen	Kota Blitar	
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	0 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 Laporan	Kota Blitar	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif) SKM Layanan UKPBJ	5 nilai 82 nilai	4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	Kota Blitar	
							4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	Kota Blitar	
							4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	Kota Blitar	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan sumber daya alam yang ditindaklanjuti Persentase Rata-Rata Pencapaian Kinerja DBHCHT	2 dokumen 82.5 %	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	Kota Blitar	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD										
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat	80.5 indeks 80.5 indeks	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	100 %	4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	53 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	39 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Blitar	
							4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	218 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Blitar	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	76 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	Kota Blitar	
							4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	14 Paket	Kota Blitar	
							4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	Kota Blitar	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD 100 % Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan 100 %		4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD sesuai standar	100 %	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	Kota Blitar	
							4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	Kota Blitar	
							4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	Kota Blitar	
							4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	Kota Blitar	
							4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	2 Dokumen	Kota Blitar	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase fasilitasi pembahasan anggaran sesuai standar	100 %	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	Kota Blitar	
							4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	Kota Blitar	
							4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	Kota Blitar	
							4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	Kota Blitar	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase fasilitasi fungsi pengawasan DPRD sesuai standar	100 %	4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	Kota Blitar	
							4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	Kota Blitar	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100 %	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	Kota Blitar	
							4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5 Dokumen	Kota Blitar	
							4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7 Orang	Kota Blitar	
							4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	4 Orang	Kota Blitar	
							4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Kota Blitar	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100 %	4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	Kota Blitar	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100 %	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11 Dokumen	Kota Blitar	
							4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	Kota Blitar	
	5.01 PERENCANAAN										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.3 indeks	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD Persentase Capaian Sasaran RPJMD	95.56 % 91.10 %	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Sesuai ketentuan Regulasi	100 %	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	Kota Blitar	
							5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	Kota Blitar	
							5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Kota Blitar	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi Pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100 %	5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Kota Blitar	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil pengendalian yang Ditindaklanjuti	100 %	5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	Kota Blitar	
							5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	Kota Blitar	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah 81 % Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD (Tujuan, Program, Kegiatan, dan Indikator) 100 %		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	Kota Blitar	
							5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	Kota Blitar	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan hasil fasilitasi koordinasi perencanaan bidang perekonomian	3 dokumen	5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	Kota Blitar	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan hasil fasilitasi koordinasi perencanaan bidang infrastruktur	3 dokumen	5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Kota Blitar	
	5.02 KEUANGAN										
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat 84 Indeks		5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu 100 % Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 % 100 % Persentase tertib perencanaan keuangan daerah 100 %		5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase rencana anggaran daerah yang telah dikoordinasikan dan disusun	100 %	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	Kota Blitar	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib penatausahaan Keuangan	68 OPD	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	302 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	274 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	329 Laporan	Kota Blitar	
							5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	356 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	Kota Blitar	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi	100 %	5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14 Laporan	Kota Blitar	
							5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	Kota Blitar	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan BTT dan Santunan Kematian	100 %	5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Kota Blitar	
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang penyerapan anggarannya diatas 85% Jumlah persentase rencana anggaran daerah yang telah dikoordinasikan dan disusun	68 OPD 100 %	5.02.02.2.05.01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Kota Blitar	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi	35 %	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah yang difasilitasi tindak lanjut penatausahaannya/penyelesaian permasalahannya	100 %	5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kota Blitar	
							5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Blitar	
							5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Blitar	
							5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kota Blitar	
							5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	29 Laporan	Kota Blitar	
							5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	150 Laporan	Kota Blitar	
							5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	Kota Blitar	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah Persentase Peningkatan target pendapatan pajak daerah	31.45 % 31.45 %	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak	1 dokumen	5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Blitar	
							5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Laporan	Kota Blitar	
							5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	9 Laporan	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50000 Obyek Pajak	Kota Blitar	
							5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	215 Layanan	Kota Blitar	
							5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	49095 Dokumen	Kota Blitar	
							5.02.04.2.01.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	Kota Blitar	
	5.03 KEPEGAWAIAN										
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83,25 Indeks		5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80 Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi Persentase data kepegawaian yang valid Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	44.20 % 90.16 % 43.67 % 63 % 55 % 91.18 %	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase data kepegawaian yang dikelola Persentase layanan pensiun tepat waktu Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui	95 % 100 % 8 %	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Kota Blitar	
							5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Kota Blitar	
							5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	Kota Blitar	
							5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Blitar	
							5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 dokumen	Kota Blitar	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan	17 %	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	Kota Blitar	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN tenaga fungsional yang melaksanakan diklat Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	5.5 % 7 %	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	250 Orang	Kota Blitar	
							5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	Kota Blitar	
							5.03.02.2.03.07 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	Kota Blitar	
							5.03.02.2.03.08 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	16 Orang	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP yang diverifikasi	91.66 %	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Laporan	Kota Blitar	
							5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	160 Orang	Kota Blitar	
							5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	Kota Blitar	
							5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	2 Dokumen	Kota Blitar	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	96.70 %	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	1.2 %	5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	109 Orang	Kota Blitar	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pemanfaatan hasil litbang pemerintahan, sosial, kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah Persentase rekomendasi litbang yang menjadi kebijakan	100 % 14.3 %	5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	Kota Blitar	
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil litbang Ekonomi dan Pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	5.05.02.2.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	Kota Blitar	
							5.05.02.2.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	Kota Blitar	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Fasilitasi Inovasi yang Ditindaklanjuti	100 %	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 Dokumen	Kota Blitar	
							5.05.02.2.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	Kota Blitar	
							5.05.02.2.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Kota Blitar	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH										
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	83.5 INDEKS	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							6.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	250 Dokumen	Kota Blitar	
							6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	6.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							6.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	Kota Blitar	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	104 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi) Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1 Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2 Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1 Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	90 % 87 % 87 % 75 % 75 %	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	10 PD 79 % 87.5 % 90 %	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30 Laporan	Kota Blitar	
							6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	Kota Blitar	
							6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	11 Laporan	Semua Kab/Kota	
							6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	50 Laporan	Kota Blitar	
							6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	Kota Blitar	
							6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	52 Dokumen	Kota Blitar	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	100 %	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	Kota Blitar	
							6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	Kota Blitar	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A) Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	29 OPD 1 OPD 100 %	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	4 DOKUMEN	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	Kota Blitar	
							6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	4 PD 100 % 100 %	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	29 perangkat daerah	Kota Blitar	
							6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	Kota Blitar	
							6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16 Kegiatan	Kota Blitar	
							6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 perangkat daerah	Kota Blitar	
	7.01 KECAMATAN										
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 89 baik Indeks Kepuasan Masyarakat 83 baik Indeks Kepuasan Masyarakat 83 indeks Indeks Kepuasan Masyarakat 83 Indeks Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83 Indeks Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84 indeks Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84 (Baik) Indeks Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Baik 0 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Baik indeks Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Baik (84) Indeks Jumlah Dokumen IKM yang tersusun 100 % Jumlah IKM yang tersusun 100 % Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 85 Indeks Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 85 Nilai Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Baik Indeks		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen IKM yang tersusun Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat dan sesuai standar persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 persen 100 Persen 100 % 100 persen	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dokumen		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
					Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		
					Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 persen		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan		
					Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 Persen					
					Persentase Pelayanan Administrasi keuangan perangkat Daerah sesuai standar	100 %					
					Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standard	100 Persen					
					Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100 %					
					Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100 %					
					Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100 persen					
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %					
					Presentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %					
					prosentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100 %					
					Prosentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100 %					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan//semesteran SKPD	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dokumen		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
					Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 persen		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standard	100 Persen		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standart	100 %		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket		
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket		
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 persen		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket		
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 Persen		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket		
					Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 %		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket		
					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	100 %					
					Persentase pelayanan Administrasi kepegawaian perangkat Daerah yang sesuai standart	100 %					
					Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100 %					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	76 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	108 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
					Persentase ketersediaan administrasi perangkat umum perangkat daerah yang sesuai standart	100 %		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		
					Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
					Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	1 dokumen		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		
					Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %					
					Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 persen					
					Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 Persen					
					Persentase ketersediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai Standar	100 %					
					Persentase Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 persen					
					Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standar	100 %					
					Persentase ketersediaan administrasi umum perangkatdaerah sesuai standart	100 %					
							7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		
							7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	107 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Orang		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	551 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	750 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1440 Paket		
							7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 x 12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Undang-Undangan yang disediakan	12 dokumen		
							7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Unit	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
					Persentase Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan yang tersedia sesuai standar	100 Persen		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		
					persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit		
					Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit		
					Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan	100 %		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit		
					Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	54 Unit		
					Persentase pengadaan BMD penunjang sesuai kebutuhan	100 %		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Unit		
					Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %					
					Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %					
					Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %					
					Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 persen					
					Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan	100 %					
					Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sesuai Kebutuhan	100 Persen					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 8 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							7.01.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Kota Blitar	
							7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Blitar	
							7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Blitar	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai standar Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar Persentase penyediaan Jasa penunjang urusan sesuai standard Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart Prosentase Kesediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	3 Rekening 100 % 100 % 100 % 100 persen 100 % 100 % 100 persen 100 persen 100 Persen 100 Persen 100 % 100 %	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan 3 x 12 Laporan 12 Laporan 24 Laporan 36 Laporan 36 Rekening 48 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan 13 Laporan 24 Laporan 36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen IKM yang tersusun Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara Sesuai standart Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar Persentase BMD yang terpelihara sesuai standard Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 % 100 % 100 persen 100 Persen 100 % 100 % 100 persen 100 Persen 100 % 100 % 100 Persen 100 % 100 %	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Blitar	
							7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit 6 Unit 7 Unit 10 Unit 12 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Paket 1 Unit 2 Unit 6 Unit 10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Paket		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit		
								Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 Unit		
							7.01.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Blitar	
							7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket 1 Unit 2 Unit 4 Unit 6 Unit	Kota Blitar	
							7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu Persentase layanan kecamatan tepat waktu Persentase layanan kecamatan tepat waktu Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu Persentase Pelayanan Kecamatan Tepat waktu Presentase Pelayanan Kecamatan Tepat Waktu	97 % 97 persen 97 Persen 100 % 100 Persen 97 % 100 Persen 97 %	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Persentase koordinasi bidang pelayanan pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilakksanakan sesuai standar persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart Persentase Koordinasi di bidang Pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar Persentase Kordinasi Bidang Pelayanan yang di laksanakan sesuai standar Prosentase koordinasi bidang pelayanana yang dilaksanakan sesuai standar Prosentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	2 Dokumen 4 Laporan 100 % 100 Persen 100 % 100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 100 % 100 persen 100 persen 100 % 100 persen 100 %	7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah dokumen perencananaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	1 dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 5 Laporan 7 Laporan 10 Laporan 40 Laporan	Kota Blitar	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan sesuai standar 1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti 2. Persentase rt berdaya 2. Persentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pembendayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang di tindak lanjut Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase hasil koordinasi bidang	100 persen 100 % 75 persen 75 % 100 persen 100 % 100 % 100 persen 100 %	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar Presentae koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar Presentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar Presentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	100 % 100 % 100 Persen 100 % 100 % 100 persen 100 persen 100 % 100 % 100 %	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32 lembaga 47 Lembaga 11 lembaga 2 lembaga 3 Lembaga	Kota Blitar	

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti									
		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindak lanjuti	100 persen								
		Persentase rt berdaya	75 %								
		Persentase RT berdaya	75 %								
		Persentase RT Berdaya	100 %								
		Persentase RT Berdaya	75 %								
		Persentase RT Berdaya	75 persen								
		Preesentase RT Berdaya	75 %								
		Presentase RT Berdaya	100 persen								
		Presentase RT Berdaya	75 %								
		Presentasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %								
		Presentasi hasil koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan yang ditindak lanjuti	100 %								
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 lembaga		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 lembaga		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 lembaga		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Lembaga		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31 lembaga		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	41 Lembaga Kemasyarakatan		

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45 lembaga		
								umlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga		
							7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	8 Pokmas/Ormas	Kota Blitar	
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	13 Pokmas/Ormas		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas/Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	47 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	56 Pokmas / Ormas		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	78 Pokmas / Ormas		
								Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	6 laporan	Kota Blitar	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	4 Lembaga		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	6 lembaga		
					Jumlah lembaga/ organisasikemasyarakatan yang difasilitasi	100 %		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 lembaga		
					Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar	100 persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga		
					Persentase koordinasi bidang pelayananyang dilaksanakan sesuai standar	100 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan		
					Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan		
					Persentase Koordinasi Bidang Pelayanan yang dilaksanakan Sesuai Standart	100 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Ormas		
					Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 lembaga		
					Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 Persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan		
					Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 lembaga		
					Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	100 persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan		
					Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 Persen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 lembaga		
					Presentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga		
					Presentasi koordinasi bidang lembaga pemberdayaan kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Lembaga Kemasyarakatan		
					Presentasi koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 lembaga		
					Terlaksananya pemberdayaa lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan	100 %					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	Kota Blitar	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		
								Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan		
								Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Repub	145 Orang	Kota Blitar	
		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 persen		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standar	100 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12 Orang		
		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 Persen		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standar	100 persen					
		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindak lanjuti	100 Persen		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standar	100 Persen					
		Persentase Koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standar	100 Persen					
		Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %					
		Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti	100 %		Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 persen					
		Presentase koordinasi pemerintahan umum bidang pembangunan, ketertiban dan ketentraman umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 persen		Persentase Koordinasi Pemerintahan umun bidang pemerintahan ketetraman dan ketertiban umum yang di laksanakan sesuai standart	100 %					
					Presentase koordinasi Pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	85 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	135 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	142 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	208 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	238 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	239 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	554 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	600 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	755 Orang		

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1080 Orang		
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,7 indeks	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100 %	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	100 %	8.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							8.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19 Orang	Semua Kab/Kota Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat darah sesuai standart	100 %	8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	8.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Blitar	
							8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							8.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							8.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Blitar	
							8.01.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Kota Blitar	
							8.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							8.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
							8.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Blitar	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kampung Berkarakter Pancasila 9,5 persen Persentase penyelesaian konflik keagamaan 100 %		8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pembentukan Kampung Berkarater Pancasila Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5 kampung 82 %	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	Kota Blitar	
							8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.02.2.01.06 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga	Kota Blitar	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100 %	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	82 %	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 Orang	Kota Blitar	
							8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	Kota Blitar	
							8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Laporan	Kota Blitar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	68 %	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang aktif	125 ormas	8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	Kota Blitar	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	77 %	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti soisalisasi	87 %	8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250 Orang	Kota Blitar	
							8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	Kota Blitar	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	100 %	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditindaklanjuti	100 %	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1810 Orang	Kota Blitar	
							8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	Kota Blitar	
							8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan kewajiban setiap Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemeritahanan konkuren baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai dengan kewenangannya. Urusan pemerintahan dimaksud dilaksanakan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat memeliki hubungan Keuangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi: a. pemberian sumber pendapatan asli daerah berasal dari pemungutan pajak daerah, dan retribusi daerah; b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang; dan d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, insentif (fiskal).

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Belanja Daerah dapat diberikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik

Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2023 direncanakan dengan plafon anggaran sementara dengan mempertimbangkan pencapaian target pembangunan daerah termasuk pelaksanaan prioritas pembangunan Tahun 2023, penerapan SPM dan mendukung prioritas nasional dan provinsi. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan petimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah APBD TA 2023 didasarkan pada RKPD Tahun 2023, penyusunannya didasarkan pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan bidang

urusan yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590) meliputi :

a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,
b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
c. Urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik

Plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2023 disajikan pada tabel 4.1 di bawah.

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	211.134.410.080	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	211.134.410.080	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	198.240.208.397	
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	130.600.275.397	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	516.264.380	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	361.720.316	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	154.544.064	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	126.479.751.369	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	126.450.650.151	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.101.218	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	402.456.713	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	93.121.400	
1.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	228.066.073	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	81.269.240	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	518.897.083	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.869.348	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.667.005	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.167.799	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.961.236	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.207.095	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.129.200	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.200.000	
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	46.695.400	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.851.161	
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	38.838.625	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.012.536	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.679.307.611	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.737.600	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	786.600.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	dan Listrik		
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	886.970.011	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	836.747.080	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.681.880	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.075.200	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	273.240.000	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.750.000	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	57.927.866.657	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	21.943.966.621	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	435.690.065	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	122.748.064	
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	3.639.610.812	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	33.001.024	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	3.529.541.599	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.782.900.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	944.509.021	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	17.412.650	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	770.827.877	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	96.235.450	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	10.287.999.984	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	241.050.000	
1.01.02.2.01.33	Pemeliharaan Mebel Sekolah	42.440.075	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.902.421.017	
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	10.424.025.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	564.300.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	221.794.955	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56.461.900	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	426.364.171	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	45.971.282	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12.086.500.059	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	77.003.650	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.161.446.511	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	126.285.400	
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	140.828.089	
1.01.02.2.03.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	106.140.384	
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	25.036.800	
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	1.443.930.725	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.931.750.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	530.779.253	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	253.860.310	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	24.478.330	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.547.857.220	
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	30.500.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.920.032.508	
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	62.641.500	
1.01.02.2.04.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	142.100.013	
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	1.191.244.650	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	738.965.000	
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	5.338.218	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	293.358.902	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	289.895.670	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	21.642.640	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.157.769.460	
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.076.455	
01.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	924.238.574	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	716.020.579	
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	165.914.451	
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	42.500.203	
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	85.258.000	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	422.347.925	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	208.217.995	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	119.629.987	
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	25.225.708	
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	63.362.300	
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8.760.815.995	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.760.815.995	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.146.425.923	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	614.390.072	
01.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	27.011.774	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	27.011.774	
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	13.450.856	
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	13.560.918	
1.01.0.00.0.00.01.0001	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	1.445.135.330	
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	208.550.476	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.946.130	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.946.130	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.342.764	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.355.164	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19.987.600	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.788.026	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.985.484	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.133.378	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.861.940	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.412.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.075.224	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.320.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.664.356	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.664.356	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.103.200	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.043.200	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.060.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.706.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.752.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.954.000	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.236.584.854	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.236.584.854	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	147.784.800	
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	95.102.800	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	529.771.246	
1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	69.880.800	
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	42.698.100	
1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	187.087.488	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	75.549.589	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	88.710.031	
1.01.0.00.0.00.01.0002	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	1.522.506.033	
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	365.084.492	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.069.910	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.069.910	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.300.000	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.700.000	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.450.638	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.339.056	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.737.878	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.295.872	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.236.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.601.832	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.240.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	149.839.824	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.839.824	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.581.120	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	625.920	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.955.200	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.843.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.652.800	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.190.200	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.157.421.541	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.157.421.541	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	198.500.000	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	54.159.321	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	433.122.680	
1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	215.695.000	
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25.500.000	
1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	174.005.760	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	56.438.780	
1.01.0.00.0.00.01.0003	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	1.166.549.895	
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	193.148.920	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.035.735	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.035.735	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.150.000	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.750.000	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.400.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.988.945	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.034.012	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.605.479	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.947.972	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.705.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.556.482	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.140.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	98.926.440	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Pemerintahan Daerah		
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	469.440	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.457.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.047.800	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.047.800	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	973.400.975	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	973.400.975	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	77.400.000	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	408.513.020	
1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	116.100.000	
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	130.489.181	
1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	173.106.000	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	13.775.989	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	54.016.785	
1.01.0.00.0.00.01.0004	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	1.455.235.247	
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	253.631.888	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.349.072	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.349.072	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.344.480	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38.544.480	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.313.739	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.728.653	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.032.927	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.771.322	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.232.500	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.848.337	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.586.177	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.586.177	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.013.760	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.356.160	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	37.657.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	dan Listrik		
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.024.660	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.589.160	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.425.500	
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.010.000	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.201.603.359	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.201.603.359	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	85.803.250	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	106.140.327	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	492.850.784	
1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	84.050.000	
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	143.300.000	
1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	168.161.232	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	69.835.896	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	51.461.870	
1.01.0.00.0.00.01.0005	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	1.625.021.500	
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	739.985.149	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.095.291	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.095.291	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.331.700	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44.000.000	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.331.700	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.046.067	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.725.099	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.653.273	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.255.815	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.551.880	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.860.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	361.705.291	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.104.471	
1.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	348.600.820	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.432.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.564.800	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.868.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.374.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.635.800	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.448.200	
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	127.290.000	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	885.036.351	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	885.036.351	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	410.641.700	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	56.062.301	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	262.914.500	
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	41.596.000	
1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	87.824.400	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	25.997.450	
1.01.0.00.0.00.01.0006	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	1.123.244.975	
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	479.479.112	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.098.154	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.098.154	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.650.000	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.050.000	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.648.268	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.273.662	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.332.036	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.861.038	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.521.532	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.660.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	321.866.130	
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	124.152.397	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	197.713.733	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.634.560	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	834.560	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.800.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.582.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.512.200	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.069.800	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	643.765.863	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	643.765.863	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	180.557.150	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	174.447.036	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	172.700.280	
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20.283.000	
1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	76.792.560	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	18.985.837	
1.01.0.00.0.00.01.0007	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	1.819.560.000	
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	221.615.769	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.715.160	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.715.160	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.000.000	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.600.000	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.666.313	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.044.336	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.559.877	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.404.100	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.200.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.208.000	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.250.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.521.600	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	521.600	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.712.696	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.641.896	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.070.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.597.944.231	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.597.944.231	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	971.850.000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	60.303.571	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	329.893.560	
1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	50.000.000	
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.500.000	
1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	136.372.320	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	42.024.780	
1.01.0.00.0.00.01.0008	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	1.329.350.730	
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	231.109.644	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.313.850	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.313.850	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.295.200	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.800.000	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.495.200	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.717.618	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.053.969	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.500.668	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.053.385	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.922.500	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.967.096	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.220.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.351.696	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.351.696	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.253.880	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	938.880	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.315.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.177.400	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.169.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.008.400	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.098.241.086	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	1.098.241.086	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Pertama		
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	29.465.200	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	310.637.434	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	370.364.032	
1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	75.582.000	
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	92.828.500	
1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	142.918.400	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	76.445.520	
1.01.0.00.0.00.01.0009	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	1.407.597.973	
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	192.290.438	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.958.950	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.958.950	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.920.600	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.000.000	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.920.600	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.076.868	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.377.976	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.166.338	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.950.787	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.526.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.655.767	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.905.920	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	625.920	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.280.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.428.100	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.838.400	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.589.700	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.215.307.535	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.215.307.535	
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	181.805.700	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	158.200.000	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	32.929.545	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	96.235.725	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	399.124.710	
1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	51.931.410	
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	71.166.300	
1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	169.330.745	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	54.583.400	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	271.420.175.201	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	271.420.175.201	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	82.779.586.179	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.377.077.653	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.039.645	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.380.000	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.659.645	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.947.496.400	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.928.416.400	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19.080.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.876.129	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.660.000	
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130.216.129	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	766.471.495	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.068.554	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.078.366	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.539.648	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.285.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.778.219	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.180.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	496.921.800	
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	93.619.908	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	344.916.247	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	27.500.000	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	317.416.247	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.384.333.251	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	352.751.100	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.031.582.151	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	703.944.486	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.108.286	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.844.200	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	411.992.000	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	52.113.060.618	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.640.542.397	
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	600.000.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.000.000.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.903.470.011	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.131.735.432	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.818.426.103	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	129.515.851	
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	57.395.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.389.607.928	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	291.598.150	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	66.492.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	44.412.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	44.943.851	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	86.343.500	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	76.780.417	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	48.189.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	36.054.542	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.168.525	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	94.955.187	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	72.785.833	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	270.646.981	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	126.070.839	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	8.054.835	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	155.332.800	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14.598.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.157.600	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	185.650.025	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	9.300.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	111.872.898	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.429.500	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	24.141.301	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	298.793.457	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	31.599.916.120	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	471.000.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	163.727.800	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	8.239.175.987	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	344.663.173	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	185.239.461	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	139.829.162	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	65.869.978	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	71.810.314	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	27.604.692	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	75.260.293	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	75.260.293	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.650.000	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	7.650.000	
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	257.800.220	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	36.682.900	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	36.682.900	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	121.117.320	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	121.117.320	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	277.546.103	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	37.492.400	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	37.492.400	
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	11.511.703	
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	11.511.703	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	121.390.000	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	121.390.000	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	107.152.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	107.152.000	
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.754.101.585	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.724.356.575	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.724.356.575	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.745.010	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	29.745.010	
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	2.452.590.000	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.452.590.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	305.627.400	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	96.551.198	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	58.158.765	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	150.917.437	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.146.962.600	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	76.152.130	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.045.500	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.400.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	36.454.444	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32.582.100	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	78.331.799	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	36.703.300	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19.817.316	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.276.726	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	59.230.058	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	81.954.474	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	48.490.357	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	94.172.666	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	104.372.160	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	18.015.308	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Olahraga		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.760.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	128.878.541	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	165.988.082	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.120.587.639	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	22.750.000	
1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo	2.410.000.000	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.410.000.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	410.000.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	131.668.722	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	93.856.738	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	184.474.540	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.929.728	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	178.586.220	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.759.432	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	76.039.900	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	53.914.259	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	52.045.443	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	58.908.714	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	170.460.318	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	84.831.882	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	37.829.800	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	74.256.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	372.376.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18.120.996	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	135.946.580	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	116.249.730	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	523.744.998	
1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan	2.666.371.164	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.666.371.164	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	419.281.164	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	53.433.975	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	100.774.312	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	265.072.877	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.247.090.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.469.920	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.094.980	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	25.282.412	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	395.359.069	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	79.746.750	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	42.775.467	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	146.125.894	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	49.725.500	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.419.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	41.674.720	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	75.534.987	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	44.687.234	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	127.179.413	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.500.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	23.098.400	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	120.964.941	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.409.149	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	194.821.120	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	806.221.044	
1.02.0.00.0.00.01.0004	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	181.111.627.858	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	173.067.176.267	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.067.176.267	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.067.176.267	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	139.000.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	139.000.000.000	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.044.451.591	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.044.451.591	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.044.451.591	
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	46.908.188.434	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46.908.188.434	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46.908.188.434	
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.595.700.314	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.076.148	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.076.148	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.929.871.652	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.927.703.792	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.167.860	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	133.828.250	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	94.208.250	
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	39.620.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	678.343.664	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.574.080	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264.755.308	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.966.868	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.965.000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.977.408	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.130.000	
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.375.000	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.665.600	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	125.110.400	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.555.200	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.003.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.953.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.050.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.912.000	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	191.881.400	
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	18.200.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.760.400	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.590.000	
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.480.200	
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.579.726.984	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.579.726.984	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	300.000.000	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.282.400.000	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.964.702.120	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.032.624.864	
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	307.528.900	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	307.528.900	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	119.378.900	
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	88.150.000	
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	100.000.000	
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.267.604.118	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.267.604.118	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	416.855.747	
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	149.000.000	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	824.000.000	
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	72.022.859	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000.000	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	502.780.000	
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	25.335.200	
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	177.610.312	
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	8.631.822.300	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.631.822.300	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	177.873.820	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.440.371.460	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1.516.716.800	
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	108.860.220	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	388.000.000	
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5.872.126.318	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	5.872.126.318	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	255.813.868	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5.616.312.450	
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	9.440.857.989	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	9.440.857.989	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	400.000.000	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	5.286.421.316	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.441.616.674	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	750.000.000	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	443.880.000	
1.03.10.2.01.17	Pelebaran Jembatan	389.999.999	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	628.940.000	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	100.000.000	
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	731.908.929	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	387.216.184	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	135.767.165	
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	251.449.019	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	194.692.745	
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	7.453.145	
1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	67.950.000	
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	73.129.600	
1.03.11.2.02.09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	46.160.000	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	150.000.000	
1.03.11.2.04.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	150.000.000	
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.480.912.582	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	129.467.846	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	129.467.846	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	775.000.000	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	775.000.000	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	226.146.623	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	151.146.623	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	75.000.000	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	350.298.113	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	350.298.113	
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.658.423.277	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.658.423.277	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.658.423.277	
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.810.035.905	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.275.080	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.637.540	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.637.540	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.509.911.660	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.503.046.660	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.865.000	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.401.453	
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	68.750.000	
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22.651.453	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.804.792	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.712.433	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.904.833	
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.304.880	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.000.000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.684.946	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.040.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.157.700	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.551.249	
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.551.249	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.249.871	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.399.871	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	629.850.000	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.841.800	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.893.000	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.488.800	
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.460.000	
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.120.814.020	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	22.500.015	
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	22.500.015	
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	29.999.754	
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	29.999.754	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	149.999.719	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	149.999.719	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	918.314.532	
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	918.314.532	
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.936.434.109	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	124.749.200	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	100.000.000	
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	10.550.400	
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	14.198.800	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.811.684.909	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.765.750.000	
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	14.902.730	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	954.773.022	
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	76.259.157	
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.393.950.012	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.393.950.012	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.393.950.012	
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.397.189.231	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.397.189.231	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.319.689.253	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	77.499.978	
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.311.113.065	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	11.811.217.966	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	11.811.217.966	
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.728.923.157	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.652.080	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.146.669	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.505.411	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.744.701.393	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.743.788.291	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	913.102	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	146.568.912	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	118.397.218	
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28.171.694	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.346.575	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.138.535	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.948.790	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.971.637	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.200.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.509.413	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.178.200	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.305.015	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.305.015	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.119.124	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.519.124	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.600.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.230.058	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	278.297.678	
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.800.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.652.380	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.480.000	
01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.365.732.408	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.651.611.063	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	2.844.138.087	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	44.329.928	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	411.169.010	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.189.460.512	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	162.513.526	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	714.121.345	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	230.767.147	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10.894.934	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	472.459.264	
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	716.562.401	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	244.731.400	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.901.560	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.556.000	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	3.432.000	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	219.841.840	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	298.389.792	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	292.639.792	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	5.750.000	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	173.441.209	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	173.441.209	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.499.895.099	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.499.895.099	
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.902.706.056	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.604.009	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.234.028	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.369.981	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.703.674.632	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.696.089.092	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.585.540	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.001.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	86.043.075	
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	63.957.925	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.480.841	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.191.664	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.096.416	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.647.190	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.216.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.788.571	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.141.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	304.864.674	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	27.114.856	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	277.749.818	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.413.500	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.713.500	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.700.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.667.400	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.442.200	
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	6.503.500	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.721.700	
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.597.189.043	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	359.506.830	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	359.506.830	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	574.538.076	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	93.464.224	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	331.796.179	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	149.277.673	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	468.054.479	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	468.054.479	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	195.089.658	
1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	195.089.658	
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	25.486.870.839	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	25.486.870.839	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	25.486.870.839	
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.418.454.115	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.207.745	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.093.975	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.113.770	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.458.604.778	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.453.673.463	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.931.315	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	122.329.108	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.100.000	
1.06.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	99.229.108	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.733.629	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.955.188	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.919.276	
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.621.784	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.468.000	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.052.831	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.316.550	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.124.349	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.124.349	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.041.724	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.641.724	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	368.400.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.412.782	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.682.300	
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.240.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.677.800	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.812.682	
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.427.266.448	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.427.266.448	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.427.266.448	
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	955.903.751	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	660.998.113	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	347.426.839	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	4.898.158	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	279.379.581	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	29.293.535	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	294.905.638	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	236.443.312	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	58.462.326	
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	18.437.454.778	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	18.437.454.778	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	103.955.958	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	17.761.653.869	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	571.844.951	
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	200.035.433	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	51.554.340	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	18.653.196	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	32.901.144	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	148.481.093	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	148.481.093	
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	47.756.314	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	47.756.314	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	47.756.314	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.838.639.273	
2.17.2.07.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	1.838.639.273	
2.17.2.07.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	1.838.639.273	
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.599.999.913	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.599.999.913	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.599.999.913	
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	215.810.960	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	131.149.399	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	131.149.399	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	84.661.561	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	84.661.561	
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	22.828.400	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	22.828.400	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.300.000	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	17.528.400	
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.768.943.623	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.768.943.623	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.768.943.623	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.995.517.538	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.546.095	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.620.095	
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.926.000	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.242.215.447	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.238.593.047	
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.622.400	
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.265.230	
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41.580.000	
2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34.685.230	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.985.361	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.588.881	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.780.153	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.551.207	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.183.500	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.533.670	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.985.250	
2.08.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.962.700	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.824.000	
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.824.000	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.019.845	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.199.680	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.120.165	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.700.000	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.661.560	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.448.960	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.202.600	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.010.000	
2.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000	
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	865.338.181	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	87.640.770	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	87.640.770	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	259.069.046	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	183.599.246	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	75.469.800	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	518.628.365	
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	73.450.166	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	445.178.199	
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	392.556.529	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	92.777.974	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	92.777.974	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	199.604.195	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	43.249.340	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	156.354.855	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.174.360	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	46.819.298	
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	53.355.062	
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	75.388.960	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	26.699.809	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	26.699.809	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	48.689.151	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.920.686	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.768.465	
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	440.142.415	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	156.671.007	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	156.671.007	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	192.686.710	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	192.686.710	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.784.698	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.784.698	
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	8.909.454.735	
2.09.3.25.3.27.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.909.454.735	
2.09.3.25.3.27.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.909.454.735	
02.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.231.221.584	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.240.622	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.034.504	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.206.118	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.249.975.327	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.247.205.223	
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.770.104	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.117.000	
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.500.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47.617.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.309.229	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.864.534	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.284.930	
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.684.023	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.291.000	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.296.942	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.940.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.947.800	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.389.447.408	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.105.408	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.239.342.000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.131.998	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.872.708	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.259.290	
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	614.098.926	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	502.924.977	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2.923.970	
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	500.001.007	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	111.173.949	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	58.602.069	
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	52.571.880	
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	53.677.450	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	53.677.450	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	53.677.450	
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	10.456.775	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	10.456.775	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10.456.775	
02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	344.899.400	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	344.899.400	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	344.899.400	
02.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	15.750.000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.750.000	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.750.000	
02.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	329.149.400	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	329.149.400	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100.000.000	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	229.149.400	
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	23.483.822.660	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	23.483.822.660	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	23.483.822.660	
02.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.426.244.761	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.871.539	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.828.000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.043.539	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.172.423.568	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.168.074.018	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.349.550	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.279.100	
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	68.100.000	
2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38.179.100	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	369.893.769	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.720.299	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.109.453	
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.446.318	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.772.000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.167.299	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.680.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.998.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	132.455.737	
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	14.369.563	
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.086.174	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.798.151	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.598.151	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.200.000	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.522.897	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.149.500	
2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.520.000	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.983.300	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.870.097	
02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	405.141.904	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	147.717.821	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	147.717.821	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	257.424.083	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	257.424.083	
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	824.210.967	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	824.210.967	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	382.841.521	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	441.369.446	
02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.471.388.917	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.471.388.917	
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	2.471.388.917	
02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	13.968.612	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.968.612	
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	13.968.612	
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	192.214.694	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	192.214.694	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	69.403.663	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	122.811.031	
02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	404.964.499	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	404.964.499	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	281.038.762	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	123.925.737	
02.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	383.545.190	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	383.545.190	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	383.545.190	
02.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	16.540.856	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	16.540.856	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	16.540.856	
02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.345.602.260	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	11.345.602.260	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	7.291.360	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di	6.659.328.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	494.873.186	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.184.109.714	
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.954.920.644	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.954.920.644	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.954.920.644	
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.509.090.332	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.262.934	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.752.033	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.510.901	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.503.213.248	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.503.213.248	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.918.204	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.158.720	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	53.759.484	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.487.500	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.814.152	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.349.661	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.935.120	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.405.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.971.095	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.394.072	
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.518.400	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.620.612	
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.641.600	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	2.580.880	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.398.132	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.791.600	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.591.600	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.200.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.796.234	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.224.354	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.749.800	
2.12.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	822.080	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	404.216.224	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	389.232.224	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	8.989.920	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	380.242.304	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	7.096.000	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	7.096.000	
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	7.888.000	
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	7.888.000	
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	258.724.222	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	72.704.381	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	48.620.381	
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	24.084.000	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	162.125.018	
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	4.659.000	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	70.872.480	
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	53.080.169	
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	33.513.369	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	23.894.823	
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	23.894.823	
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	736.947.306	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	150.583.569	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	144.717.631	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5.865.938	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	207.635.533	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	207.635.533	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	268.094.384	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	131.091.018	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	137.003.366	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	110.633.820	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	58.079.086	
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	52.554.734	
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	45.942.560	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	45.942.560	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	45.942.560	
02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	132.518.619	
4.01.2.13.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	132.518.619	
4.01.2.13.0.00.01.0001	Bagian Pemerintahan	132.518.619	
02.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	132.518.619	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	132.518.619	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	132.518.619	
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.648.722.264	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.648.722.264	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.648.722.264	
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	215.155.574	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	79.500.386	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	24.999.936	
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	54.500.450	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	135.655.188	
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	24.999.997	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	36.255.174	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	74.400.017	
02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.644.550.166	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	305.169.984	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.218.500	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.271.623	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	71.392.465	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	43.221.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	124.940.196	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	36.126.200	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	368.239.715	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	368.239.715	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	772.136.821	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.248.092	
2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	15.450.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	229.062.420	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	367.000.000	
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	49.510.758	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.112.150	
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	12.560.351	
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	76.193.050	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	199.003.646	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	199.003.646	
02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	789.016.524	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	789.016.524	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	111.125.802	
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	611.289.852	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	66.600.870	
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	20.232.312.146	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	20.232.312.146	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	20.232.312.146	
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.051.543.686	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.442.120	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.839.560	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.602.560	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.310.386.305	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.309.228.089	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.158.216	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.278.643	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47.160.000	
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	103.118.643	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.205.890	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.865.043	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.002.134	
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.837.677	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.584.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.673.536	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.200.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.731.000	
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.312.500	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.358.588	
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.220.000	
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	6.780.488	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.358.100	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	674.429.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.479.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	430.950.000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.443.140	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	283.126.900	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.516.240	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.800.000	
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	13.180.768.460	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.586.367.215	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	998.802.480	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	95.517.064	
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	6.297.562.111	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	194.485.560	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	294.666.911	
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	101.697.251	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	192.969.660	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.289.487.403	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.289.487.403	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	237.778.417	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	106.509.585	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	106.268.832	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.191.913.777	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	113.215.844	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	84.406.715	
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	90.108.632	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.904.182.586	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.580.554.737	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	588.589.988	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	991.964.749	
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.361.522.223	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	13.361.522.223	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	13.361.522.223	
02.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.139.108.391	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.100.001	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.001	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.100.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.897.121.847	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.889.586.000	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.535.847	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.463.457	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.200.000	
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70.263.457	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.034.690	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.016.155	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.645.805	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.625.603	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.325.700	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.005.927	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.380.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.035.500	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.041.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324.991.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.050.000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.347.396	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.127.470	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.219.926	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	
02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.193.788.250	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.193.788.250	
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	30.560.412	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	17.220.910	
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	9.229.493	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	187.041.128	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	612.236.620	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	518.178.723	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	570.989.405	
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	173.355.730	
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	5.653.486	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	14.100.522	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	55.221.821	
02.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.028.625.582	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.045.334.618	
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	5.950.000	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.250.000	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.001.134.618	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	983.290.964	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.550.593	
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	50.795.000	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	7.767.062	
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	259.874.510	
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	79.367.062	
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	9.827.062	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	278.645.082	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1.590.000	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	41.831.172	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	245.326.359	
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1.717.062	
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.601.276.920	
2.17.2.07.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	6.601.276.920	
2.17.2.07.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	6.601.276.920	
02.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.446.885.755	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.155.823	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	6.365.970	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Daerah		
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.789.853	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.637.097.634	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.635.435.502	
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.662.132	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.204.492	
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41.250.000	
2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.954.492	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.369.936	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.648	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.415.515	
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.543.579	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.247.900	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.656.244	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.587.050	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.039.490	
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8.429.060	
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.498.430	
2.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.112.000	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.547.510	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.347.510	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.200.000	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.470.870	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.710.870	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.910.000	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.850.000	
02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	322.169.808	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	322.169.808	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	322.169.808	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	22.668.589	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	22.668.589	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	22.668.589	
02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	77.761.092	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	77.761.092	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	77.761.092	
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	494.199.862	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	90.000.000	
2.17.05.2.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	404.199.862	
2.17.05.2.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	404.199.862	
02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	246.228.909	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	246.228.909	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	229.460.484	
2.17.06.2.01.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	16.768.425	
02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	565.051.606	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	565.051.606	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	86.663.748	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	145.242.022	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	91.028.804	
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	242.117.032	
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	426.311.299	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	426.311.299	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	426.311.299	
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.971.879.025	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.971.879.025	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.971.879.025	
02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.923.715.800	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.899.212	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.450.655	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.448.557	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.045.544.380	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.044.544.405	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	999.975	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.353.000	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58.390.400	
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	49.962.600	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.200.677	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.461.644	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.642.069	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.824.850	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.224.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.487.046	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.161.068	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.041.871.031	
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	22.918.590	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.952.441	
2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	403.350.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Pemerintahan Daerah		
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	298.350.000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.497.500	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.035.100	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.462.400	
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	30.229.000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	30.229.000	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	30.229.000	
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	196.646.892	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	196.646.892	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	196.646.892	
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	449.266.333	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	449.266.333	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	140.587.696	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	253.123.632	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	55.555.005	
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	372.021.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	372.021.000	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	21.285.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	233.954.986	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	116.781.014	
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13.556.471.925	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	13.556.471.925	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	13.556.471.925	
02.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.170.296.702	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.109.807	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.486.800	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.623.007	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.737.224.201	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.734.724.502	
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.499.699	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.275.360	
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	36.450.000	
2.19.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38.825.360	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	472.288.755	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.739.683	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.811.654	
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	106.863.148	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.592.500	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.087.070	
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.794.700	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.011.178	
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.011.178	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.602.872.801	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.801	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.567.872.000	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.514.600	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.848.600	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.666.000	
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	806.829.865	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	782.419.512	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	36.327.744	
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	24.824.704	
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	14.072.692	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	251.342.159	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	455.852.213	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.410.353	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	24.410.353	
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.050.760.063	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.249.798.190	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.249.798.190	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	280.201.420	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	205.029.845	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	75.171.575	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	66.158.118	
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	66.158.118	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5.183.240.723	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5.105.000.000	
2.19.03.2.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	78.240.723	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	271.361.612	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	271.361.612	
02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	528.585.295	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	528.585.295	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	350.000.000	
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	28.439.295	
2.19.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	150.146.000	
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	331.633.515	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	331.633.515	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	331.633.515	
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	331.633.515	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	331.633.515	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	284.514.834	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	10.127.513	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	25.000.000	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	4.405.584	
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	3.180.000	
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	4.405.584	
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	269.971.784	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	269.971.784	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	269.971.784	
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	269.971.784	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	170.058.326	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97.263.685	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31.392.853	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	27.009.230	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.392.558	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	99.913.458	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99.913.458	
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.373.277.555	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.373.277.555	
2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.373.277.555	
02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	459.239.455	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	179.962.600	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	99.820.000	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	80.142.600	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	279.276.855	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	279.276.855	
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	653.535.600	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	653.535.600	
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	450.064.200	
2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	203.471.400	
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	260.502.500	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	260.502.500	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	260.502.500	
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.952.518.806	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.952.518.806	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.952.518.806	
02.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.125.882.994	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.597.113	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.647.678	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.949.435	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.654.979.118	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.653.852.318	
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.126.800	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.223.772	
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.400.000	
2.23.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43.823.772	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.214.628	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.510.371	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.218.479	
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.654.558	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.628.800	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.048.460	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.053.960	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	588.843.142	
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	334.043.771	
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	254.799.371	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	363.610.006	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.260.006	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	298.350.000	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.415.215	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.559.215	
2.23.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.430.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.988.000	
2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.438.000	
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	826.635.812	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	483.280.997	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	104.263.782	
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.718.906	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	36.641.971	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.655.237	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	138.644.311	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.356.790	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	343.354.815	
2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	222.358.855	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	50.633.980	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	70.361.980	
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	523.915.606	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	523.915.606	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	523.915.606	
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	523.915.606	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	442.264.361	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	183.480.997	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	258.783.364	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	81.651.245	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	81.651.245	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.605.444.256	
2.09.3.25.3.27.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.605.444.256	
2.09.3.25.3.27.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.605.444.256	
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	260.835.757	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	118.499.328	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	65.759.879	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	52.739.449	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	142.336.429	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	120.000.128	
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	22.336.301	
03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.344.608.499	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	25.622.350	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	25.622.350	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.318.986.149	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.352.030	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.263.634.119	
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	9.091.033.290	
2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.091.033.290	
2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.091.033.290	
03.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.184.909.108	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.232.948	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.993.770	
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.239.178	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.587.482.927	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.585.917.927	
3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.565.000	
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.381.274	
3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42.580.000	
3.26.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.801.274	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.404.373	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.385.458	
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.396.531	
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.484.704	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.323.800	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.121.630	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.540.000	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.683.500	
3.26.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.468.750	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.473.312	
3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.473.312	
3.26.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.035.946.394	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336.661.200	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.699.285.194	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.987.880	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.915.480	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.522.400	
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.550.000	
03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	654.213.942	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	460.729.756	
3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	296.470.506	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	164.259.250	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	190.304.186	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.009.098	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	18.256.000	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	72.039.088	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	3.180.000	
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	3.180.000	
03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	248.451.617	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	248.451.617	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	27.885.534	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	199.780.214	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	15.000.000	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5.785.869	
03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.458.623	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.458.623	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3.458.623	
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2.731.836.564	
2.09.3.25.3.27.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.731.836.564	
2.09.3.25.3.27.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.731.836.564	
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	207.054.231	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	115.859.596	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	65.854.301	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	50.005.295	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	53.536.222	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	53.536.222	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.865.959	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	23.942.036	
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	8.923.923	
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	4.792.454	
3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	4.792.454	
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	887.353.475	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	37.352.056	
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	35.232.056	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2.120.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	850.001.419	
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	850.001.419	
03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	275.868.777	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	41.055.509	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	41.055.509	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	184.600.368	
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	17.456.970	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	167.143.398	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	28.337.483	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	19.717.876	
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	8.619.607	
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	21.875.417	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	21.875.417	
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	16.149.460	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	16.149.460	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	16.149.460	
03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	39.343.180	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.018.530	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	28.018.530	
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	5.525.724	
3.27.06.2.02.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	5.525.724	
3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	5.798.926	
3.27.06.2.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	5.798.926	
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.306.067.441	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.306.067.441	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	44.984.203	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.256.345.632	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4.737.606	
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	25.601.360.272	
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.601.360.272	
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.601.360.272	
03.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.831.517.510	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.624.429	
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.492.774	
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.131.655	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.582.024.404	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.576.615.844	
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.408.560	
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.324.184	
3.30.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	78.375.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Kelengkapannya		
3.30.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	49.949.184	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.245.347	
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.015.321	
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.872.591	
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.544.235	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.937.500	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.679.950	
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.840.000	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.355.750	
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	156.791.000	
3.30.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	156.791.000	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.330.650	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.430.650	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.900.000	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.177.496	
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196.151.796	
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.195.700	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.350.000	
3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.480.000	
03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	18.321.089.116	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17.554.281.624	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	14.284.875.574	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.269.406.050	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	766.807.492	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	389.519.124	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	377.288.368	
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	224.282.246	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	22.796.446	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	22.796.446	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	177.385.800	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	177.385.800	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.100.000	
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	24.100.000	
03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	224.471.400	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	224.471.400	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	100.595.893	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	123.875.507	
03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.378.971.380	
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.378.971.380	
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.378.971.380	
03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.378.971.380	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.378.971.380	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	188.878.503	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.017.813.869	
3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	172.279.008	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	41.844.797.887	
4.01.2.13.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	41.844.797.887	
4.01.2.13.0.00.01.0001	Bagian Pemerintahan	2.680.039.641	
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.680.039.641	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	2.574.902.542	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	284.781.762	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2.121.056.089	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	169.064.691	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	105.137.099	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	105.137.099	
4.01.2.13.0.00.01.0002	Bagian Hukum	929.113.097	
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	929.113.097	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	KESEJAHTERAAN RAKYAT		
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	929.113.097	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	345.859.852	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	366.031.912	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	217.221.333	
4.01.2.13.0.00.01.0003	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	11.387.063.263	
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.448.023.317	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10.448.023.317	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.762.477.963	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	530.385.967	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	155.159.387	
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	939.039.946	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	863.130.960	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	569.403.026	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	21.838.536	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	271.889.398	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	75.908.986	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	75.908.986	
4.01.2.13.0.00.01.0004	Bagian Umum	24.705.483.808	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.705.483.808	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.346.058	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.346.058	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.837.792.919	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.827.123.695	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.669.224	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.755.000	
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.395.000	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.360.000	
4.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.590.000	
4.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.590.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.951.477.463	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.847.374	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.644.428	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.642.271	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	744.697.180	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	83.508.210	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	737.138.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.224.148	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	25.655.002	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.569.146	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.209.258.600	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	626.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.029.928.600	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.148.704.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.341.960.800	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.697.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	297.393.800	
4.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.000.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	420.910.000	
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	272.960.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	947.759.114	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	178.952.314	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	162.806.800	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.093.357.914	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.892.975.967	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.601.569.666	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	598.812.281	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Sekretariat Daerah		
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.190.961.792	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	1.858.096.559	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	137.852.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	195.013.233	
4.01.2.13.0.00.01.0005	Bagian Organisasi	1.213.914.630	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.213.914.630	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.750.252	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.754.140	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.996.112	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	153.212.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	120.814.000	
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32.398.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	982.952.378	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	253.338.854	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	368.128.628	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	319.145.574	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	26.506.492	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	15.832.830	
4.01.2.13.0.00.01.0006	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	929.183.448	
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	929.183.448	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	203.608.620	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	72.471.170	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	131.137.450	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	725.574.828	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	399.049.072	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	70.182.000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	256.343.756	
04.02	SEKRETARIAT DPRD	33.135.051.800	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	33.135.051.800	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	33.135.051.800	
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.738.510.419	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.582.818	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.505.950	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.076.868	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.866.684.755	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.866.684.755	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.931.900	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.500.000	
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	93.431.900	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	755.102.132	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56.414.125	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.516.301	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.796.800	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	132.357.956	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.800.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	98.103.200	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	247.113.750	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.981.931.042	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	942.198.758	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	267.071.931	
4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	772.660.353	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.080.918.384	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.571.384	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	841.347.000	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	901.087.813	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	418.469.663	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.685.100	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	228.235.000	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	148.698.050	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12.990.271.575	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12.608.444.000	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	306.827.575	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.000.000	
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.396.541.381	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.521.612.896	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	159.285.200	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.110.627.696	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	75.000.000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	150.000.000	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	26.700.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.795.616.979	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	355.692.422	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	366.292.047	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	276.886.984	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	313.329.914	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	483.415.612	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	650.661.931	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	248.598.500	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	402.063.431	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.996.008.367	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.656.061.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	480.047.367	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	296.070.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	228.000.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	335.830.000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.069.005.461	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.069.005.461	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	3.363.635.747	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.304.785.747	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	58.850.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
05.01	PERENCANAAN	7.715.989.468	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.715.989.468	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.715.989.468	
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.895.125.979	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.673.018	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.099.192	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.573.826	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.748.468.317	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.743.251.546	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.216.771	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.042.145	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	53.375.000	
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.667.145	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	525.065.096	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	715.640	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.791.818	
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.287.552	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.750.000	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.117.086	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.500.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	351.318.000	
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.585.000	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.414.679	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.414.679	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.560.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.960.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.600.000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.902.724	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.777.324	
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	16.800.000	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.817.400	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.508.000	
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.060.225.288	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.814.127.021	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.172.574.144	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	185.702.509	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	352.940.230	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	102.910.138	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	56.950.072	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	56.950.072	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	189.148.195	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	151.084.764	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	38.063.431	
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	760.638.201	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	360.881.720	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	176.827.219	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	184.054.501	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	205.078.461	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	205.078.461	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	194.678.020	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	194.678.020	
05.02	KEUANGAN	22.739.179.317	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	22.739.179.317	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	22.739.179.317	
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.282.467.391	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.723.972	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.870.766	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.853.206	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.503.354.262	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.499.805.062	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.549.200	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	253.071.300	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	129.375.000	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	123.696.300	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	764.633.593	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.370.340	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.592.934	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.043.227	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.666.280	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	300.113.930	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.961.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354.965.000	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.920.882	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	161.631.361	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8.511.100	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.120.261	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.420.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.520.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.900.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.632.903	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.847.884	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.223.500	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	118.561.519	
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.939.548.174	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.520.650.145	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	80.208.295	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	84.314.795	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	38.862.610	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	30.531.610	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	39.466.220	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	104.180.202	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	783.436.939	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	122.602.130	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	148.981.600	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	88.065.744	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	471.426.734	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	104.782.071	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1.692.500	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16.310.174	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2.788.702	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	83.708.117	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	36.701.270	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	225.443.900	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	798.244.975	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	115.585.866	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	49.762.161	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.385.416	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	133.660.911	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10.686.277	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	941.432	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	131.739.599	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	60.420.313	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	294.063.000	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.000.000.000	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.000.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	149.226.320	
5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	49.226.320	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100.000.000	
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.252.416.557	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.252.416.557	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	150.000.000	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	16.588.000	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	203.178.222	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	902.732.235	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	100.000.000	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	100.000.000	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	334.189.800	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	53.000.000	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	256.660.000	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	136.068.300	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.264.747.195	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.264.747.195	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	277.641.781	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	76.492.328	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	215.502.350	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	500.433.400	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	443.263.658	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	208.188.907	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	1.503.506.361	
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	39.718.410	
05.03	KEPEGAWAIAN	15.298.682.334	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.298.682.334	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.298.682.334	
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.299.916.183	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.936.444	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.185.568	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.750.876	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.006.081.384	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.001.533.494	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.547.890	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.270.024.706	
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.051.000.000	
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	59.052.830	
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	159.971.876	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	562.894.162	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.438.314	
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.419.472	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.890.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.534.376	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	444.012.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.183.196	
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	40.183.196	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.416.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.416.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.380.291	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.580.836	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.929.200	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.870.255	
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.998.766.151	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.068.423.315	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	30.640.424	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.482.454.096	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	72.339.255	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Pemberhentian		
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	350.000.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	80.545.080	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	52.444.460	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	818.210.625	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	818.210.625	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.816.413.695	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	352.685.567	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.196.634.774	
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	8.785.138	
5.03.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	258.308.216	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	295.718.516	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	88.746.057	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	92.736.511	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	90.282.204	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	17.489.711	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	6.464.033	
05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	943.914.163	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	943.914.163	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	943.914.163	
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	943.914.163	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	943.914.163	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	943.914.163	
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	728.331.743	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	728.331.743	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	728.331.743	
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	728.331.743	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	231.151.972	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	231.151.972	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	238.104.628	
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	119.348.071	
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	118.756.557	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	259.075.143	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	54.983.396	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	146.578.853	
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	25.921.048	
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	31.591.846	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
06.01	INSPEKTORAT DAERAH	10.230.329.575	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	10.230.329.575	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	10.230.329.575	
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.540.700.349	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.070.186	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.990.310	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69.079.876	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.841.347.755	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.819.959.147	
6.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.634.350	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.754.258	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	395.245.328	
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	52.875.000	
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	112.310.328	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	230.060.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.286.464	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.164.579	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.010.021	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.318.594	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.241.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.719.270	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.433.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	283.097.156	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	77.104.584	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205.992.572	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.778.260	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	88.863.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	dan Listrik		
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	304.915.260	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.875.200	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.169.100	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	113.280.000	
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.426.100	
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.094.184.606	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.031.971.896	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	108.273.771	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	84.716.463	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	227.184.450	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	134.488.503	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	1.397.749.551	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	79.559.158	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	62.212.710	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	30.255.666	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	31.957.044	
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	595.444.620	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	73.153.239	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	15.263.016	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	57.890.223	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	522.291.381	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	69.101.225	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	77.045.208	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	71.914.948	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	304.230.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
07.01	KECAMATAN	95.581.328.370	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Kepanjenkidul	33.186.653.018	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Kepanjenkidul	17.161.154.684	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.229.084.373	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.969.376	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.190.608	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.778.768	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.490.519.817	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.488.912.562	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.607.255	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.910.447	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.856.520	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.115.909	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.473.011	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.999.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.477.407	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.380.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.608.100	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.055.052.379	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.052.378	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000.001	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	938.265.368	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.215.368	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	895.050.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.366.986	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.883.266	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.243.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.840.720	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	189.400.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	453.249.107	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	453.249.107	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Daerah yang Ada di Kecamatan		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.312.700	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	451.936.407	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.244.594.149	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	682.517.237	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	76.761.412	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	605.755.825	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	562.076.912	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	370.988.085	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	191.088.827	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	234.227.055	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	234.227.055	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	234.227.055	
7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Kepanjenkidul	3.308.817.000	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	212.632.600	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.001.754	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.153.400	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.848.354	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.184.700	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.184.700	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.480.276	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45.480.276	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.637.834	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.538.696	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.665.136	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.326.658	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.713.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.494.344	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.708.297	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8.017.097	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.691.200	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.413.960	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.413.960	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.205.779	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.829.600	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.437.600	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.323.200	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.080.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.535.379	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.709.454	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	49.709.454	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8.529.454	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	41.180.000	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.948.235.200	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.817.300.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32.720.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.784.580.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	130.935.200	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	123.373.500	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.561.700	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	98.239.746	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	98.239.746	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	98.239.746	
7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Ngadirejo	1.528.987.000	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	110.180.346	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.240.240	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142.712	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.097.528	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	177.908	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	177.908	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.280.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.000.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19.280.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.061.422	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.369.818	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.797.147	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.510.857	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.898.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.065.600	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.740.676	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.740.676	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.680.100	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.850.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.490.100	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.340.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.018.312	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.018.312	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	518.312	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	19.500.000	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.355.888.342	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.168.618.342	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	171.791.119	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	996.827.223	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	187.270.000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	141.516.892	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	45.753.108	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.900.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.900.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	42.900.000	
7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Sentul	2.305.000.000	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	141.429.341	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.656.352	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.751.290	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.905.062	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.927.818	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.927.818	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.038.623	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.000.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24.038.623	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.168.148	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.429.703	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.681.962	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.825.108	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.500.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.331.375	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.164.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.164.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.474.400	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.264.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.210.400	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.176.758	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	24.176.758	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.119.956	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	23.056.802	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.105.855.483	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.882.722.333	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29.560.833	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.853.161.500	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	223.133.150	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	211.645.104	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	11.488.046	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.538.418	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.538.418	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	33.538.418	
7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Kauman	2.259.000.000	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	191.196.938	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.159.800	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.579.900	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.579.900	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.346.100	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.346.100	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.811.484	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.200.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34.611.484	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.397.766	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.914.979	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.175.005	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.225.819	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.440.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.781.963	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.860.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.964.488	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	6.780.488	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.184.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.315.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.315.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.202.300	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.780.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.422.300	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.634.930	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	37.634.930	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.740.930	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	34.894.000	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.986.454.359	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.821.108.316	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31.057.816	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.790.050.500	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	165.346.043	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	144.268.170	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	21.077.873	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	43.713.773	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	43.713.773	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	43.713.773	
7.01.0.00.0.00.01.0005	Kelurahan Tanggung	2.357.694.587	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	181.483.586	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.156.313	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.187.124	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	969.189	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.662.689	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.662.689	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.586.246	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.500.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34.086.246	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.480.885	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.375.338	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.822.808	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.012.031	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.038.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.951.908	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.280.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.630.173	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.630.173	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.840.880	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.840.880	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.126.400	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.578.400	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.048.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.500.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.460.383	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	50.460.383	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	845.908	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	49.614.475	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.048.272.939	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.931.097.266	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.674.623	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.914.422.643	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	117.175.673	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	110.018.936	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.156.737	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	77.477.679	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	77.477.679	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	77.477.679	
7.01.0.00.0.00.01.0006	Kelurahan Bendo	2.147.000.000	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	175.353.400	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.039.464	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.457.956	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.581.508	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	900.885	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	900.885	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.743.600	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.500.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.243.600	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.526.892	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.128.719	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.031.335	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.902.578	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.770.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.794.260	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.768.559	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.768.559	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.264.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.264.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.110.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.780.200	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.629.800	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.700.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59.113.023	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	59.113.023	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.362.408	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	57.750.615	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.831.912.869	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.687.915.446	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	29.792.016	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Kelurahan		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.658.123.430	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	143.997.423	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	120.364.884	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	23.632.539	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.620.708	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	80.620.708	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80.620.708	
7.01.0.00.0.00.01.0007	Kelurahan Kepanjenlor	2.118.999.747	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	130.190.551	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.290.170	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.349.464	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.940.706	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.608.771	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.608.771	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.650.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.600.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35.050.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.777.810	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.990.950	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.677.261	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.045.430	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.740.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.044.169	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.280.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.072.800	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.072.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.791.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.540.400	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.440.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.370.600	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.440.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.311.371	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	29.311.371	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3.651.371	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	25.660.000	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.880.173.437	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.708.657.243	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24.180.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.684.477.243	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	171.516.194	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	160.396.194	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	11.120.000	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	79.324.388	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	79.324.388	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	79.324.388	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukorejo	27.456.555.160	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukorejo	13.045.464.743	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.115.960.677	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.752.350	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.521.674	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.230.676	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.809.493.891	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.804.088.757	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.405.134	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	158.870.219	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	29.760.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	129.110.219	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	303.424.206	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.839.010	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.219.289	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.917.717	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.609.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.244.690	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.994.500	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.653.691	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	58.245.916	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.407.775	
7.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	40.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.152.450.400	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.940.400	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.107.510.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.315.920	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.778.120	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.670.800	
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	5.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	159.872.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	216.995.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	439.792.775	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	439.792.775	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.676.216	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	438.116.559	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.200.108.063	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	836.040.069	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	62.737.152	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	773.302.917	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	364.067.994	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	225.041.010	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	139.026.984	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	289.603.228	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	289.603.228	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	289.603.228	
7.01.0.00.0.00.02.0001	Kelurahan Pakunden	2.525.696.937	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	183.623.793	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.486.101	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	775.133	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	710.968	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	813.624	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	813.624	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.949.312	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.949.312	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.185.630	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.514.587	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.550.585	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.520.068	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.907.300	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.293.090	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	5.400.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Perundang-undangan		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.912.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.912.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.827.856	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.827.856	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.449.270	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.512.800	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.086.200	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.850.270	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.083.765	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	68.083.765	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	879.408	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	67.204.357	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.213.930.828	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.052.537.775	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29.310.975	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.023.226.800	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	161.393.053	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	134.054.940	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	27.338.113	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.058.551	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.058.551	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60.058.551	
7.01.0.00.0.00.02.0002	Kelurahan Blitar	1.385.222.172	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	133.540.894	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.974.306	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.078.538	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.895.768	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.804.220	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.804.220	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.013.200	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.000.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38.013.200	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.486.750	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.944.758	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.471.799	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.214.160	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.162.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.293.233	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.121.618	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.121.618	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.140.800	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.469.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.671.800	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.643.996	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	29.643.996	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.289.666	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	27.354.330	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.184.561.502	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	976.847.111	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.675.111	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	961.172.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	207.714.391	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	191.756.455	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.957.936	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	37.475.780	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	37.475.780	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	37.475.780	
7.01.0.00.0.00.02.0003	Kelurahan Tlumpu	1.383.264.300	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	187.804.322	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.175.986	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	643.078	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	532.908	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	782.500	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	782.500	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.964.612	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.949.312	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18.015.300	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.961.524	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.668.984	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.501.533	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.022.697	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.366.200	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.702.110	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.775.200	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.775.200	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.144.500	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.055.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.089.500	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.646.521	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25.646.521	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	919.704	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	24.726.817	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.122.283.457	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.007.215.028	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23.999.428	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	983.215.600	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	115.068.429	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	110.020.863	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.047.566	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.530.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	47.530.000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	47.530.000	
7.01.0.00.0.00.02.0004	Kelurahan Turi	1.205.762.396	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	179.507.740	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.968.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.272.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.696.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.696.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.696.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.173.389	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.500.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28.673.389	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.796.543	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.253.930	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.916.582	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.417.108	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.186.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.122.923	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.345.600	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.345.600	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.360.608	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.360.608	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.167.600	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.200.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.817.600	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.150.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.739.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	51.739.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	848.000	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	50.891.000	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	925.623.250	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	803.564.318	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21.534.318	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	782.030.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	122.058.932	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	116.216.132	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.842.800	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	48.892.406	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	48.892.406	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	48.892.406	
7.01.0.00.0.00.02.0005	Kelurahan Karangsari	1.493.139.755	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	195.282.064	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.750.168	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.458.655	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.291.513	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.027.770	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.027.770	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.949.312	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.949.312	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.443.711	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.389.427	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.892.035	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.079.671	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.810.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.372.578	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.661.503	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.661.503	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.160.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.160.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.289.600	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.984.600	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.305.000	
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	5.000.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.652.655	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	38.652.655	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Daerah yang Ada di Kecamatan		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.652.655	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	37.000.000	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.214.678.021	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.082.469.748	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.152.548	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.063.317.200	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	132.208.273	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	123.407.458	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8.800.815	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	44.527.015	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	44.527.015	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	44.527.015	
7.01.0.00.0.00.02.0006	Kelurahan Sukorejo	3.555.060.594	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	226.033.808	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.393.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.044.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.349.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.044.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.044.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.781.624	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.698.624	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.083.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.476.483	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.059.290	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.725.176	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.326.596	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.436.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.529.421	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.195.578	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	30.399.898	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.795.680	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.334.400	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.334.400	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.808.723	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.973.600	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.766.800	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.220.700	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.447.623	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.400.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	93.541.770	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	93.541.770	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	757.770	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	92.784.000	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.177.639.235	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.023.492.022	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	48.371.064	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.975.120.958	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	154.147.213	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	135.576.013	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	18.571.200	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	57.845.781	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	57.845.781	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	57.845.781	
7.01.0.00.0.00.02.0007	Kelurahan Tanjungsari	2.862.944.263	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	231.970.649	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.293.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.431.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.862.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.360.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.360.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.813.696	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.813.696	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.140.741	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.482.706	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.088.162	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.434.223	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.342.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.893.650	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.392.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	21.511.686	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.880.314	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.219.664	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.219.664	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.751.548	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.776.200	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.384.400	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.590.948	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75.282.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	75.282.500	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	436.500	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	74.846.000	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.505.238.708	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.364.595.446	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36.702.446	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.327.893.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	140.643.262	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	126.136.107	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	14.507.155	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.452.406	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.452.406	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50.452.406	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sananwetan	34.938.120.192	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sananwetan	16.533.071.882	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.891.765.017	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.615.353	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.982.432	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.632.921	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.230.259.305	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.230.259.305	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.810.060	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.363.800	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	71.446.260	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.444.189	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.921.042	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.435.317	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.246.076	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.323.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.669.254	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.880.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.969.500	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.112.447.357	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	49.230.720	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.216.637	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.030.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.011.241.625	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.199.625	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	959.042.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.947.128	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.436.224	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.600.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.885.904	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.025.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	367.358.260	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	367.358.260	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.448.240	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	362.910.020	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.023.481.699	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	740.677.430	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	65.557.493	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	675.119.937	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	282.804.269	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	167.272.508	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	115.531.761	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	250.466.906	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	250.466.906	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250.466.906	
7.01.0.00.0.00.03.0001	Kelurahan Gedog	3.355.733.087	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	166.272.466	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.203.370	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.203.370	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	401.666	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	401.666	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.171.497	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.600.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22.571.497	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.007.116	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.476.250	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.146.099	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.055.791	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.007.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.921.976	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.129.517	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.129.517	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.780.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.180.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.579.300	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.435.600	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.143.700	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	99.826.629	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	99.826.629	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.161.756	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	98.664.873	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.045.671.319	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.976.064.802	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36.730.302	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.939.334.500	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	69.606.517	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	63.612.817	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.993.700	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	43.962.673	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	43.962.673	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	43.962.673	
7.01.0.00.0.00.03.0002	Kelurahan Plosokerep	1.780.493.870	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	246.086.737	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.017	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.100.017	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.049.832	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.049.832	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.682.190	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.200.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.482.190	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.060.443	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.909.801	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.186.472	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.629.854	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.388.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.246.316	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.661.916	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	53.054.050	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.607.866	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.618.400	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.418.400	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.200.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.913.939	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.719.400	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.958.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.036.539	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.200.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.063.958	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40.063.958	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.243.105	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	38.820.853	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.451.190.161	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.356.213.392	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22.940.919	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.333.272.473	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	94.976.769	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	80.948.415	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	14.028.354	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	43.153.014	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	43.153.014	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	43.153.014	
7.01.0.00.0.00.03.0003	Kelurahan Klampok	1.936.876.637	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	174.357.958	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.550.133	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.550.133	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.104.602	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.104.602	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.779.300	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.000.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21.779.300	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.521.630	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.937.026	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.816.973	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.929.188	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.508.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.630.443	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.069.824	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.069.824	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.889.556	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.689.556	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.200.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.442.913	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.881.100	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.561.813	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44.780.888	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	44.780.888	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3.306.947	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	41.473.941	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.684.846.298	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.563.713.546	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	55.320.687	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.508.392.859	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	121.132.752	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	78.347.586	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	42.785.166	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.891.493	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.891.493	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.891.493	
7.01.0.00.0.00.03.0004	Kelurahan Sananwetan	4.224.254.600	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	190.781.529	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.579.393	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.579.393	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.561.616	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.561.616	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.857.304	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.800.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24.057.304	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.856.592	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.533.464	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.143.868	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.090.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.409.260	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.680.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.145.208	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	18.342.072	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.803.136	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.842.116	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.042.116	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.800.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.939.300	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.898.300	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.041.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	113.580.334	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	113.580.334	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.575.712	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	111.004.622	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.834.489.205	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.630.596.039	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60.778.120	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.569.817.919	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	203.893.166	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	192.610.040	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	11.283.126	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85.403.532	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	85.403.532	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	85.403.532	
7.01.0.00.0.00.03.0005	Kelurahan Rembang	1.340.363.616	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	203.089.603	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.150.410	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.150.410	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.441.500	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.441.500	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.824.482	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.824.482	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.203.066	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.508.956	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.505.247	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.259.736	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.804.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.425.127	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.287.979	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.287.979	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.077.816	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.877.816	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.200.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.104.350	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.037.100	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.271.700	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.245.212	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.550.338	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.396.243	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	34.396.243	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.396.243	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	30.000.000	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.062.120.507	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	960.816.053	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.750.053	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	942.066.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	101.304.454	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	85.797.100	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.507.354	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.757.263	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.757.263	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40.757.263	
7.01.0.00.0.00.03.0006	Kelurahan Karangtengah	2.570.245.800	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	207.641.711	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.836.500	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.836.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.340.962	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.340.962	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.214.600	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.200.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.014.600	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.871.714	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.660.612	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.674.172	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.758.233	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.371.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.507.197	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.912.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.912.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.686.535	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.886.535	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.800.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.779.400	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.936.600	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.419.800	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.423.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46.308.284	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	46.308.284	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.876.812	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	44.431.472	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.278.780.356	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.187.025.138	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.871.288	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.156.153.850	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	91.755.218	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	62.067.523	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	29.687.695	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	37.515.449	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	37.515.449	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	37.515.449	
7.01.0.00.0.00.03.0007	Kelurahan Bendogerit	3.197.080.700	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	201.680.951	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.278.500	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.502.500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.776.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.502.500	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.502.500	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.529.212	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.529.212	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.362.757	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.246.092	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.027.388	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.918.574	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.005.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.265.703	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.903.782	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.903.782	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.870.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.970.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.234.200	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.893.400	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.590.800	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.750.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.606.938	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.606.938	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.104.908	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	82.502.030	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.871.805.611	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.718.763.707	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	52.747.036	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.666.016.671	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	153.041.904	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	126.733.483	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	26.308.421	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.987.200	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	39.987.200	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	39.987.200	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.597.902.835	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.597.902.835	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.597.902.835	
08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.781.672.529	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.800.629	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.234.028	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.566.601	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.849.627.829	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.841.336.828	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.291.001	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98.265.401	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.375.000	
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67.890.401	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.263.158	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.347.132	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.708.059	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.628.892	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.513.980	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.817.595	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.800.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.447.500	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.745.412	
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	81.636.976	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.108.436	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.133.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.433.500	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.700.000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.836.600	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.893.400	
8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	6.323.400	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.839.800	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.780.000	
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	544.976.784	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	544.976.784	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	142.017.884	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	375.000.000	
8.01.02.2.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	27.958.900	
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.242.706.865	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.242.706.865	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	139.378.042	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25.078.467	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.078.250.356	
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	28.883.107	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	28.883.107	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	28.883.107	
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	281.569.384	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	281.569.384	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	81.569.384	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200.000.000	
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.718.094.166	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.718.094.166	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	474.812.185	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	**2**	**3**	**4**
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.114.842.000	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	128.439.981	

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancer yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. Belanja operasi

   Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat

   jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari:

   1) Belanja pegawai
   2) Belanja barang dan jasa
   3) Belanja bunga
   4) Belanja subsidi
   5) Belanja hibah dan
   6) Belanja bantuan social

b. Belanja Modal

   Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja Tidak Terduga

   Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer

   Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Plafon anggaran sementara Kota Blitar berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,

Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,

Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	**2**	**3**
1	Belanja Pegawai	344.363.092.184
2	Belanja Barang dan Jasa	459.310.052.498
3	Belanja Hibah	21.084.012.257
4	Belanja Bantuan Sosial	21.702.848.292
5	BELANJA MODAL	129.940.029.642
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.106.729.761
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.148.377.938
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.897.580.900
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.787.341.043
6	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000
	TOTAL	**980.400.034.873**

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
f. Penerimaan Piutang Daerah
g. Penerimaan Dana Bergulir
h. Penerimaan Hasil Penarikan

Sementara kebijakan pengeluaran pembiayaan ditempuh melalui:

a. Pembentukan dana cadangan
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
c. Pembayaran pokok utang
d. Pemberian pinjaman daerah
e. Pemberian Dana Bergulir

Rencana plafon anggaran pembiayaan daerah Kota Blitar tahun 2023 yaitu:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp. 84.383.493.780,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2022 dipergunakan sebagai sumber penerimaan pembiayaan tahun 2023 dalam rangka menutup defisit anggaran dengan proposi yang cukup dan sesuai ketentuan yang berlaku
b. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar tentang Dana Cadangan dengan pembiayaan sebesar Rp. 16.000.000.000,00

Secara rinci Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023disajikan pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	**PEMBIAYAAN**		
06.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**84.383.493.780**	
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84.383.493.780	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**84.383.493.780**	
06.02	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**16.000.000.000**	
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	16.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**16.000.000.000**	
	Pembiayaan Netto	**68.383.493.780**	

BAB VI
PENUTUP

Pemerintah Kota Blitar menyusun PPAS tahun 2023 sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, dengan salah satu tujuan untuk menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran.

Dalam hal terdapat pergeseran asumsi yang melandasi PPAS sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta kemungkinan penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah setelah Nota Kesepakatan PPAS ditandatangani maka dapat dilakukan penyesuaian atas pagu anggaran sub kegiatan pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 dengan tanpa melakukan perubahan atas Nota Kesepakatan atas PPAS.

Penganggaran tahun 2023 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan di Kota Blitar dan mendukung prioritas nasional dan provinsi serta dapat mendukung pencapaian indikator kinerja RPJMD yang telah dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2003.

Blitar, 2 Agustus 2022

WALIKOTA BLITAR

Drs. SANTOSO, M.Pd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

KETUA,

dr. SYAHRUL ALIM

WAKIL KETUA,

ELY IDAYAH VITNAWATI

WAKIL KETUA,

AGUS ZUNAIDI, SE